

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I JAYAPURA**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai pencapaian kinerja, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui LAKIP ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. LAKIP ini disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Jayapura 2022 s.d 2024 dengan tambahan untuk tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagai pertanggungjawaban BKK Kelas I Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara yang berisi capaian program dan kegiatan BKK Kelas I Jayapura.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini bukanlah akhir dari proses akuntabilitas, melainkan salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BKK Kelas I Jayapura. Oleh karena itu, saran dan masukan positif dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam LAKIP BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi dalam upaya terus menerus untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Jayapura, 19 Januari 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Laporan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura tahun 2025 masih disusun berdasarkan revisi rencana aksi kegiatan (RAK) 2022 – 2024 dengan penambahan tahun 2025 yang merupakan turunan dari rencana aksi program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 – 2024 karena belum terdapat penetapan indikator baru pada Balai Kekarantinaan Kesehatan yang berdasarkan pada RENSTRA Kemenkes tahun 2025 – 2029.

Secara garis besar kegiatan dalam indikator kinerja yang ditetapkan terdapat dalam dua kegiatan utama pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk masuk negara dan wilayah
2. Dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator kinerja instansi pemerintah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura tahun 2025, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai selama satu tahun, terdapat 1 (satu) indikator tambahan merupakan indikator direktif Menteri Kesehatan yang tertuang dalam surat nomor PR.03.02/C.I./1142/2024 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pada tahun 2025 dari 8 (delapan) terdapat **1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu** persentase realisasi anggaran sedangkan **7 (tujuh) indikator mencapai target**, sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN, jumlah realisasi nilai indeks 0,90 dari target 0,88 dengan capaian kinerja sebesar 102%.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan jumlah realisasi 100% dari target 99% dengan capaian kinerja sebesar 101%.
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara jumlah realisasi nilai indeks 1 dari target 0,91 dengan capaian kinerja sebesar 110%.
4. Nilai kinerja anggaran jumlah realisasi 98,23 dari target 90 dengan capaian kinerja sebesar 109%.
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran jumlah realisasi 97,08 dari target 93 dengan capaian kinerja sebesar 104%.

6. Kinerja implementasi WBK satker jumlah realisasi 87,08 dari target 75 dengan capaian kinerja sebesar 116%.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya jumlah realisasi 98% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 103%.
8. Persentase realisasi anggaran jumlah realisasi 80,61% (pagu anggaran), 98,61% (pagu efektif) dari target 96% dengan capaian kinerja sebesar 84%.

Tidak tercapainya 1 (satu) indikator bukan berarti menggambarkan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025, tetapi menjadi acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di triwulan berikutnya.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan capaian kinerja keuangan, yaitu :

1. Realisasi PNBP tahun 2025 sebesar Rp. 659.353.236,- dari target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp 200.000.000,-
2. Realisasi penyerapan anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 mencapai Rp12.526.004.281,- atau sebesar 80,61% dari pagu anggaran sebesar Rp15.538.558.000,-. Setelah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran, pagu efektif menjadi sebesar Rp12.702.394.000,-, sehingga tingkat penyerapan terhadap pagu efektif mencapai 98,61%.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang berperan penting dalam mencapai realisasi anggaran sebesar 80,61% pada pagu anggaran dan 98,61% pada pagu efektif, salah satu faktor pendukung utama adalah sistem monitoring dan evaluasi yang adekuat, selain itu pelaksanaan pencairan anggaran kegiatan yang terpantau juga menjadi faktor penting, karena hal ini memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD). Salah satu faktor penghambat pada tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Selama tahun anggaran 2025 terdapat 10 (sepuluh) kali revisi DIPA dan RKAKL. Revisi DIPA antara lain berupa pemutakhiran revisi POK, penyesuaian halaman III DIPA, pengalokasian gaji NON ASN, revisi terkait efisiensi kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, revisi terkait gaji dan tunjangan dalam rangka pendistribusian anggaran untuk gaji PPPK Tahap I, PPPK Optimalisasi dan PPPK

paruh waktu dan revisi penyesuaian anggaran pagu minus belanja pegawai serta optimalisasi anggaran untuk kegiatan layanan pemeriksaan alat angkut. Revisi bertujuan untukantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja.

Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura memiliki beberapa kendala atau permasalahan antara lain:

1. Kendala pada parameter pemeriksaan alat angkut atau dokumen GCDH belum terlaksananya lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di PLBN Skouw sehingga belum ada perlintasan langsung kendaraan dari Indonesia (Jayapura) ke Papua New Guinea (Vanimo). Hal ini mempengaruhi pencapaian parameter pemeriksaan alat angkut karena GCDH belum dapat terealisasi.
2. Kendala pada parameter pemeriksaan alat angkut, belum optimalnya pengawasan alat angkut melalui RBA (*Risk Based Assessment*) di SINKARKES, karena masih terdapat agen pelayaran yang belum mengunggah dokumen Kesehatan kapal dengan lengkap atau tidak sesuai ketentuan pada aplikasi SINKARKES.
3. Terdapat kekurangan sumber daya manusia (tenaga medis dan paramedis) khususnya di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura (Kantor induk) yang menyebabkan kendala dalam kelancaran kegiatan tugas pokok dan fungsi.
4. Kendala pada persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 terkait perilaku masyarakat di wilayah buffer yang masih sering menampung air bersih menggunakan drum di luar maupun didalam rumah lebih dari 1 minggu sehingga menjadi tempat perkembangbiakan jentik *Aedes sp.*, lantas edukasi yang telah dilakukan masih sulit untuk diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.
5. Kendala dalam mencapai realisasi yang maksimal disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden. Hal tersebut juga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat dan bahan khususnya kegiatan yang berasal dari program pencegahan dan pengendalian penyakit yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari BKK Jayapura.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ISU STRATEGIS	4
C. VISI DAN MISI ORGANISASI	7
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
F. SUMBER DAYA MANUSIA	9
1. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	9
2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
3. Distribusi Pegawai berdasarkan Wilayah Kerja	11
4. Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	11
5. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. PERENCANAAN KINERJA	15
B. PERJANJIAN KINERJA (PK)	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA	24
B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	26
1. Indikator 1 : Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	26
2. Indikator 2 : Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan	42
3. Indikator 3 : Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	53
4. Indikator 4 : Nilai Kinerja Anggaran	67
5. Indikator 5 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75
6. Indikator 6 : Kinerja Implementasi WBK Satker	87
7. Indikator 7 : Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	93
8. Indikator 8 : Persentase Realisasi Anggaran	102

C. REALISASI ANGGARAN	111
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	117
BAB IV P E N U T U P	121
A. KESIMPULAN	121
B. TINDAK LANJUT	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	16
Tabel 2. Distribusi Rencana Aksi Kegiatan (RAK)	19
Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	22
Tabel 4. Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	24
Tabel 5. Distribusi Capaian Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	28
Tabel 6. Distribusi Perbandingan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025	29
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan	33
Tabel 8. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah (RAK) BKK Kelas I Jayapura	34
Tabel 9. Distribusi Capaian Indikator Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	43
Tabel 10. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025	44
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Pontianak, BKK Kupang, dan BKK Ambon Semester I Tahun 2025	45
Tabel 12. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	46
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2025	47
Tabel 14. Distribusi Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara BKP Kelas I Jayapura Tahun 2025	54
Tabel 15. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d 2025	55
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan	58
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah Tahun 2024	58
Tabel 18. Distribusi Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	68
Tabel 19. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator	69
Tabel 20. Distribusi perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Pontianak, BKK Kupang, BKK Ambon Tahun 2025	71
Tabel 21. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025	72
Tabel 22. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja	72
Tabel 23. Distribusi Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	76

Tabel 24. Distribusi Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Antara tahun 2023, 2024, dan 2025 BKK Kelas I Jayapura	79
Tabel 25. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak, dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025	81
Table 26. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	81
Tabel 27. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Kemenkes Tahun 2025	82
Tabel 28. Distribusi Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker	88
Tabel 29. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Tahun 2023 s.d Tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura	88
Tabel 30. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Antara BKK Kelas I Jayapura dan BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025	89
Tabel 31. Distribusi perbandingan realisasi kinerja dengan	90
Tabel 32. Distribusi Capaian Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura	94
Tabel 33. Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL Balai Kekarantinaan Kelas I Jayapura	95
Tabel 34. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura	96
Tabel 35. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan	97
Tabel 36. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan	97
Tabel 37. Tabel 37. Distribusi Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	104
Tabel 38. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025	105
Tabel 39. Distribusi perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Pontianak, BKK Kupang, BKK Ambon Tahun 2025	107
Tabel 40. Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja s.d Triwulan III Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura	111
Tabel 41. Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025	113
Tabel 42. Realisasi Anggaran (Rp) Menurut Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025	114
Tabel 43. Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	10
Grafik 2. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	10
Grafik 3. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Penempatan	11
Grafik 4. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	12
Grafik 5. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jabatan	12
Grafik 6. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025	13
Grafik 7. Perbandingan Persentase Capaian Parameter Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura	32
Grafik 8. Data Perbandingan Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 s.d Tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura	44
Grafik 9. Data Perbandingan Indikator Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko	56
Grafik 10. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s/d Tahun 2025	70
Grafik 11. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker tahun 2023 s.d tahun 2025	88
Grafik 12. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d 2025	95
Grafik 13. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025	106
Grafik 14. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025	9
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan dalam Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk	38
Gambar 3. Dokumentasi Faktor Risiko Yang Dikendalikan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	49
Gambar 4. Kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko	63
Gambar 5. <i>Screenshot</i> Realisasi Anggaran Om Span	103
Gambar 6. Dokumentasi Capaian Kinerja Lainnya	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi transportasi dan dinamika era perdagangan bebas meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan lalu lintas alat angkut, yang pada sisi lain berisiko menimbulkan transmisi penyakit, gangguan kesehatan, serta munculnya penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD), sehingga menuntut adanya upaya pencegahan dan penangkalan penyakit serta faktor risiko kesehatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi. Upaya ini membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, peran serta masyarakat, serta kerja sama internasional. Seiring dengan meningkatnya aktivitas di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara, yang berkaitan erat dengan potensi transmisi penyakit wabah dan penyakit lainnya yang dapat menimbulkan KKMD, penguatan sistem kewaspadaan dan pengendalian kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.

Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi. Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, karena itu transformasi di bidang Kesehatan mutlak dilaksanakan. Kementerian Kesehatan memiliki inisiasi baru pada tahun 2021 yaitu “Transformasi Kesehatan Indonesia” yang mencakup 6 (enam) jenis transformasi antara lain transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Unit Kekarantinaan Kesehatan mendukung transformasi pada pilar ke 3 (tiga) Sistem Ketahanan Kesehatan dan pilar ke 5 (lima) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Pada pilar ke 3 (tiga) sistem ketahanan kesehatan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) berperan dalam memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans, mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat dan melakukan *Table Top Exercise* kesiapsiagaan krisis dan pada pilar ke 5 (lima) transformasi SDM kesehatan berfokus pada pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan transformasi kesehatan melalui enam pilar transformasi kesehatan sejak 2021. Sejak transformasi kesehatan Kemenkes telah mencapai banyak hal. Transformasi organisasi dan budaya kerja ini berlanjut pada tahun 2025, Kemenkes mencanangkan periode akselerasi transformasi internal melalui sembilan program akselerasi. Dua program di antaranya program perubahan budaya kerja dan *re-branding* identitas Kemenkes yang diluncurkan pada bulan Februari tahun 2024. Transformasi organisasi dan budaya kerja sebagai pilar ketujuh transformasi kesehatan merupakan transformasi untuk internal Kemenkes. Transformasi internal dilakukan demi menciptakan kualitas insan Kemenkes yang hebat sehingga tujuan dan cita-cita bangsa dapat terwujud. Upaya Kemenkes melakukan perubahan budaya kerja salah satunya merancang inisiatif kampanye perubahan budaya kerja berbasis budaya berAkhlak yang berfokus pada tiga komponen perilaku, yaitu eksekusi efektif (*effective execution*), cara kerja baru (*new ways of working*), dan pelayanan unggul (*service excellent*).

Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 dan diundangkan pada 3 Maret 2023 nomenklatur Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berubah menjadi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Walaupun terjadi perubahan nomenklatur, tetapi tidak terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan meliputi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II, dan Loka Kekarantinaan Kesehatan. Penggunaan nomenklatur Balai Kekarantinaan Kesehatan mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sesuai dengan surat edaran Nomor OT.01.01/C.I/14268/2023 tahun 2023.

Kinerja instansi pemerintah, termasuk BKK Kelas I Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis dan tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi, serta strategi yang telah ditetapkan. Kinerja tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas



keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh para pemangku kepentingan diukur melalui pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Kegiatan evaluasi dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada hakikatnya merupakan proses pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas instansi. Evaluasi ini dilakukan melalui klarifikasi dan penegasan atas capaian output dan outcome yang seharusnya diwujudkan, sehingga mendukung terbangunnya organisasi yang akuntabel. Pimpinan satuan kerja berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan unit kerja yang lebih tinggi, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LAKIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah – langkah pada tahun berikutnya.

LAKIP adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (*outcome*) yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program atau indikator keluaran (*output*) yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.



Sasaran strategis dan target kinerja instansi yang tertera dalam perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/ anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil-hasil (*outcome*) ataupun keluaran-keluaran (*output*) yang harus mereka wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci, RKT merupakan satu media yang akan menghubungkan antara Renstra atau dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum ada alokasi anggaran. Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi dasar penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. PK disusun dan ditetapkan setelah anggaran disahkan.

Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai selama satu tahun. Adapun PK Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura tahun 2025 dititik beratkan pada indeks deteksi faktor risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBN, persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, nilai kinerja anggaran, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kinerja implementasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Satker, persentase peningkatan kapasitas ASN dan persentase realisasi anggaran.

LAKIP tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Permenkes 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022, tentang perubahan atas Permenkes Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes tahun 2020 - 2024 (RENSTRA). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan/kebijakan selama tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai dengan rencana strategis Kemenkes RI.

B. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura sebagai berikut :

1. Penyebaran Penyakit Polio

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/A/1206/2025 Tentang Pelaksanaan Imunisasi bagi Jemaah Haji dan Umrah. Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Pemerintah Indonesia menegaskan kewajiban vaksinasi bagi seluruh jemaah dan petugas haji. “Kewajiban vaksinasi polio bagi para jemaah dan petugas haji mengikuti ketentuan Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang dikeluarkan Maret 2025 bagi para pelaku perjalanan dari Indonesia. Berdasarkan beberapa kasus tersebut maka diperlukan percepatan upaya pencegahan kasus Polio, maka BKK Kelas I Jayapura sesuai dengan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/A/1206/2025 Tentang Pelaksanaan Imunisasi bagi Jemaah Haji dan Umrah, melakukan upaya pencegahan sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;
- 2) Melaksanakan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan yang hendak berangkat ke atau dari Arab Saudi pada saat keberangkatan dan saat kepulangan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Memberikan layanan vaksinasi polio kepada para Jemaah haji dan umrah sesuai peraturan yang berlaku.

Selain Jemaah haji dan umrah, sesuai pemantauan perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Polio di provinsi Morobe PNG, maka Petugas BKK Kelas I Jayapura wilayah kerja PLBN Skouw terus melakukan



pemantauan di pintu masuk dengan melalui pengamatan suhu tubuh (thermal scanner), pengamatan secara tanda dan gejala klinis (visual) terhadap seluruh pelaku perjalanan/pelintas yang masuk melalui wilayah perbatasan dengan menyiagakan petugas karantina kesehatan di area kedatangan/ keberangkatan PLBN Skouw.

2. Penyebaran Penyakit COVID-19

Pengawasan COVID-19, Sesuai Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 Tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus COVID-19. Selama tahun 2025 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia maupun Singapura. Walaupun belum ada kasus di Indonesia dan papua namun untuk mengimplementasikan Surat Edaran tersebut dalam upaya mencegah terjadinya KLB dan Peningkatan Kasus COVID -19.

BKK Kelas I jayapura telah melakukan pengawasan COVID-19 di pintu masuk negara melalui Wilayah kerja Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Wamena, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Sarmi, dan Wilayah PLBN Skouw, antara lain :

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang datang dari luar negeri, khususnya yang berasal dari negara yang melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan melalui pengamatan suhu tubuh (thermal scanner), pengamatan tanda dan gejala klinis terhadap seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke jayapura dengan menyiagakan petugas karantina kesehatan di area kedatangan baik di PLBN Skouw maupun wilayah kerja Bandar Udara Sentani dan Wamena
- d. Melakukan pengawasan terhadap deklarasi kesehatan pelaku perjalanan internasional termasuk Jemaah haji dan umrah melalui Satu Sehat Health Pass (SSHP) berkoordinasi petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan bandara kedatangan dan otoritas di Pintu Masuk, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

- e. Jika ditemukan pelaku perjalanan dengan bergejala demam dan/atau bergejala gangguan pernafasan maupun gejala penyakit potensial KLB/wabah lainnya, segera dirujuk ke laboratorium yang telah ditetapkan.
- f. Mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman dan aspek biosafety dan biosecurity yang berlaku di lapangan.
- g. Segera melakukan rujukan ke rumah sakit yang telah ditetapkan untuk kasus-kasus suspek yang perlu penanganan lebih lanjut.
- h. Menyampaikan himbauan kepada pelaku perjalanan agar memperhatikan :
 - 1) Menggunakan masker jika sedang sakit seperti batuk, pilek, atau demam;
 - 2) menerapkan pola hidup bersih seperti selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menerapkan etika batuk/bersin untuk menghindari penularan kepada orang lain; dan
 - 3) jika mengalami sakit selama perjalanan agar menyampaikan kepada awak atau personel alat angkut maupun kepada petugas kesehatan di pelabuhan/ bandar udara/ PLBN yang merupakan wilker BKK Kelas I Jayapura.
- i. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan setempat, serta lintas sektor yang berada di wilayah kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan COVID-19.
- j. Memberikan notifikasi terhadap kasus suspek/konfirmasi yang ditemukan kepada dinas kesehatan.

C. VISI DAN MISI ORGANISASI

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029 visi nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” “ sesuai dengan RPJMN 2025 – 2029. Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Masyarakat Yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Direktorat Jenderal P2 menjabarkan visi Presiden dan Kementerian

Kesehatan tersebut dalam visi bidang Penanggulangan Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas” sesuai dengan Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2 tahun 2019-2024.

Selaras dengan visi Ditjen P2, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura menjabarkan visi Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.

2. Misi

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni :

- 1) Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko.
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara.
- 3) Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel.
- 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BKK Kelas I Jayapura merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Dalam melaksanakan tugas BKK Kelas I Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
4. Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan.
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan.

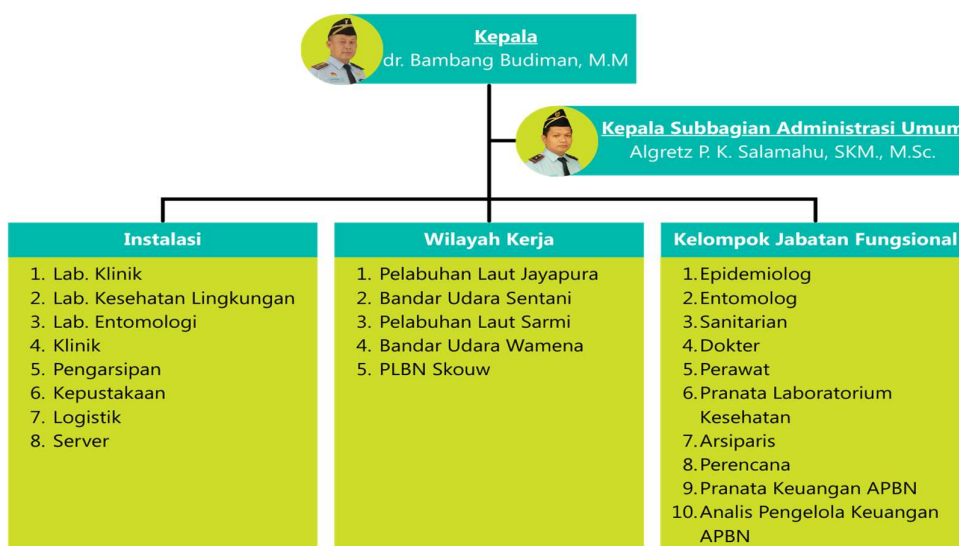


8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerjasama di bidang kekarantinaan kesehatan.
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan.
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi BKK Kelas I Jayapura berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan bahwa BKK Kelas I Jayapura termasuk dalam klasifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I adalah berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025



F. SUMBER DAYA MANUSIA

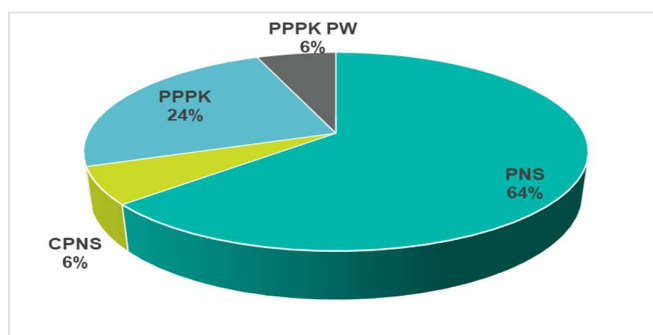
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BKK Kelas I Jayapura pada tahun 2025 sebanyak 66 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 42 orang, calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 4 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 16 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu sebanyak 4 orang . Selain ASN tersebut untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi BKK Kelas I Jayapura dibantu juga dengan tenaga *outsourcing* sebanyak 25 orang.

1. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

Pegawai BKK Kelas I Jayapura terdiri dari 42 orang PNS (64%), 4 orang CPNS (6%), 16 orang PPPK (24%) dan 4 orang PPPK paruh waktu (6%). Jumlah ASN dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

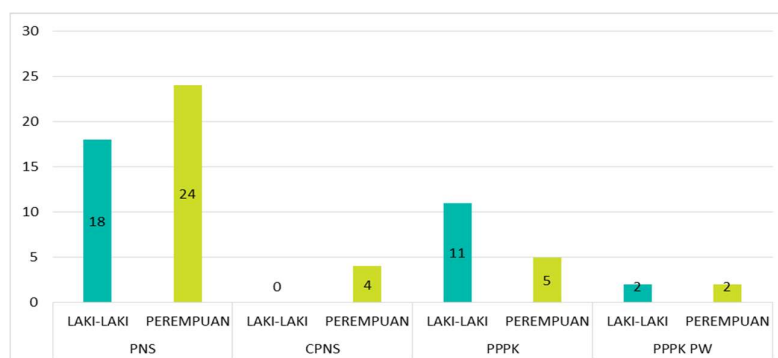
Grafik 1. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan pegawai BKK Kelas I Jayapura dari 66 orang, terbagi 33 orang jenis kelamin perempuan dan 31 orang jenis kelamin laki-laki. Jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan lebih banyak berjumlah 24 orang; jumlah CPNS berjenis kelamin perempuan 4 orang; jumlah PPPK berjenis kelamin laki-laki 11 orang dan perempuan lebih sedikit berjumlah 5 orang, serta PPPK paruh waktu berjenis kelamin laki-laki 2 orang jumlahnya sama dengan yang berjenis kelamin perempuan 2 orang, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

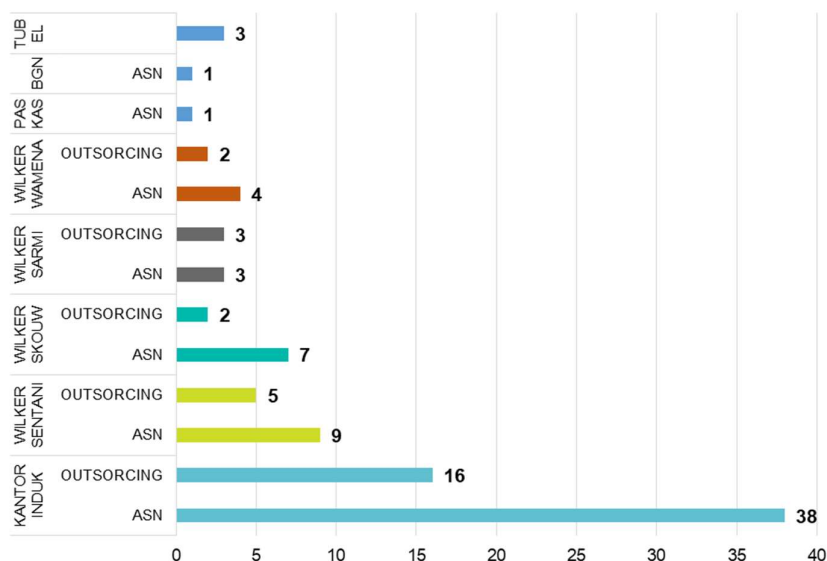
Grafik 2. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



3. Distribusi Pegawai berdasarkan Wilayah Kerja

Distribusi pegawai terbanyak yaitu di kantor induk atau Wilayah Pelabuhan Laut Jayapura, sedangkan di wilayah kerja Bandara Sentani, PLBN Skouw, Pelabuhan Sarmi dan Bandara Wamena, penempatan pegawai sesuai volume pekerjaan di masing-masing wilayah kerja, di setiap wilayah kerja terdiri dari tenaga epidemiolog, sanitarian atau entomolog dan perawat atau dokter. Selain penempatan di kantor induk terdapat juga 3 orang yang sedang tugas belajar (tubel), 1 orang yang penugasan khusus di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan (PASSKAS) Kemenkes dan 1 orang yang penugasan di Badan Gizi Nasional wilayah Jayapura, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

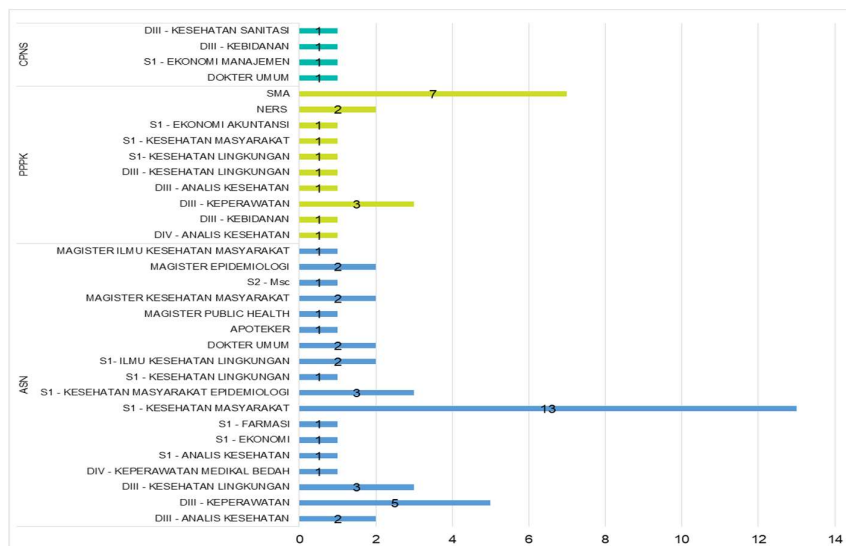
Grafik 3. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Penempatan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



4. Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Distribusi pegawai menurut pendidikan dibedakan berdasarkan jenis pegawai yaitu PNS, CPNS dan PPPK. Latar pendidikan terbanyak pada ASN yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) sebanyak 13 orang dan pasca sarjana kesehatan sebanyak 7 orang serta terdapat pendidikan SMA sebanyak 7 orang yang mengisi formasi PPPK.

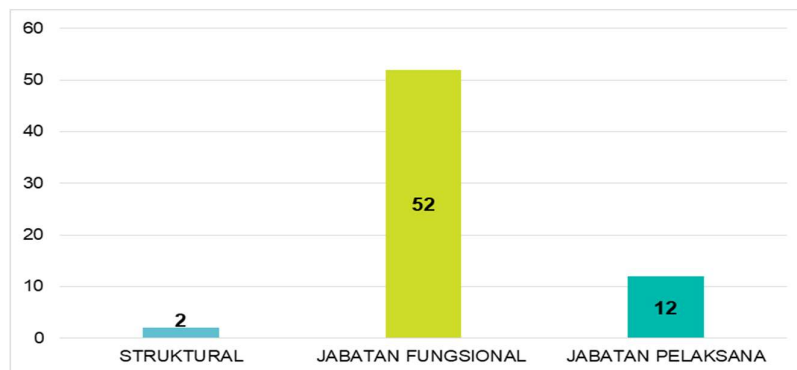
Grafik 4. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan
BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



5. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

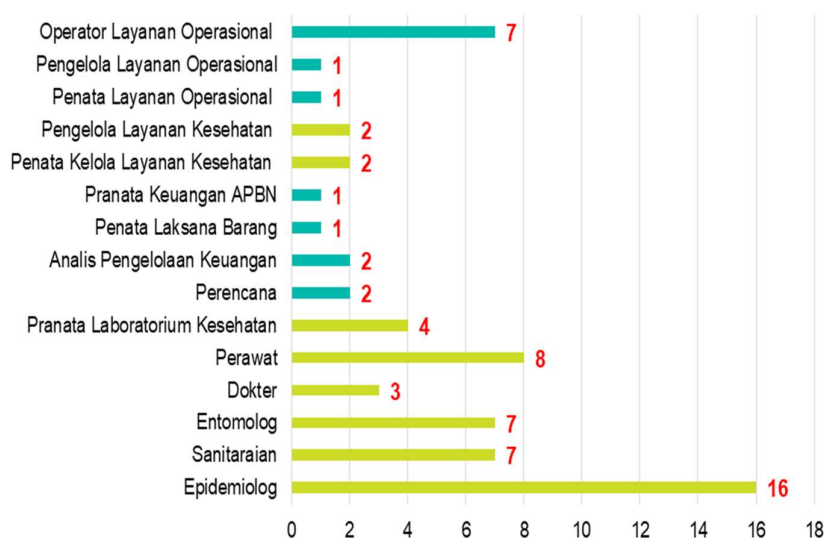
Berdasarkan grafik di bawah, pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari tiga kategori, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Jumlah terbanyak berada pada jabatan fungsional, yaitu sebanyak 52 orang, diikuti jabatan pelaksana sebanyak 12 orang pada PPPK dan ASN yang sedang menjalankan tugas belajar. Jabatan struktural terdiri dari 2 orang, yaitu Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023, Unit Balai Kekarantinaan memang terdiri dari dua jabatan struktural, yaitu Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

Grafik 5. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



Distribusi ASN berdasarkan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional non kesehatan. Jenis jabatan fungsional terbanyak yaitu epidemiolog sebanyak 16 orang yang terdiri dari epidemiolog kesehatan ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan epidemiolog terampil, kemudian jabatan perawat sebanyak 8 orang terdiri dari perawat ahli pertama, perawat penyelia dan perawat terampil. Pada jabatan sanitarian sebanyak 7 orang terdiri dari sanitarian ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan sanitarian terampil dan jabatan entomolog sebanyak 7 orang terdiri dari entomology ahli muda, ahli pertama dan entomolog terampil. Pada jabatan fungsional non kesehatan terbanyak pada jabatan analis pengelola keuangan APBN dan perencana masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan pada jabatan pelaksana yang terbanyak yaitu operator layanan operasional sebanyak 7 orang pada formasi PPPK. Gambaran tersebut dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6. Jumlah Distribusi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025



G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja BKK Kelas I Jayapura sebagai berikut :

□ Bab I (*Pendahuluan*)

Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum termasuk latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

□ Bab II (*Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*)

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan BKK Kelas I Jayapura serta kebijakan dan program serta anggaran yang direncanakan tahun 2025.

□ Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*)

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025, meliputi analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta efisiensi sumber daya baik anggaran dan manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja BKK Kelas I Jayapura selama tahun 2025.

□ Bab IV (*Penutup*)

Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja adalah dua hal yang saling terkait dalam manajemen kinerja dan merupakan hal mendasar dalam sistem akuntabilitas kinerja karena dengan melalui perencanaan dan perjanjian kinerja maka target - target terhadap kinerja akan terarah dan terukur. Perencanaan dan perjanjian kinerja adalah proses penyusunan rencana dan kesepakatan untuk mencapai tujuan kinerja suatu organisasi dan menjadi acuan untuk mengukur, mengevaluasi dan menganalisis pencapaian kinerja. Pada tahun 2025 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura, telah menyusun indikator kinerja dan target dari masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Dan pada Bab II ini, diuraikan komponen-komponen yang terdapat dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kerja atau rencana pelaksanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan Kontrak Kinerja yang menjadi dasar jaminan ketercapaian perencanaan strategis suatu organisasi terimplementasi sampai di tingkat individu dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja organisasi/individu (pimpinan organisasi/satuan kerja).

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja adalah suatu proses penyusunan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Kinerja merupakan suatu proses penetapan tahunan indikator kinerja sesuai program serta kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam suatu aksi program. Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah terhadap atasan langsung guna mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani penerima amanah yaitu Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura, pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura tahun 2025 masih disusun berdasarkan revisi rencana aksi kegiatan (RAK) 2022 –



2024 dengan tambahan tahun 2025 yang merupakan turunan dari rencana aksi program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 – 2024 karena belum ada penetapan indikator bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan yang mengacu pada RENSTRA Kemenkes dan RAK tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Jayapura terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai selama satu tahun, terdapat 1 (satu) indikator tambahan yaitu merupakan indikator direktif Menteri Kesehatan yang tertuang dalam surat Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan pada indikator PK, yaitu:

Indikator PK untuk tahun 2025 ini adalah :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.
4. Nilai kinerja anggaran.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
6. Kinerja implementasi WBK satker.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.
8. Persentase realisasi anggaran

Adapun target indikator kinerja tahun BKK Kelas I Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi dini faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,88
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,91
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%
		8	Persentase realisasi anggaran	96%

Jumlah anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan BKK Kelas I Jayapura Jayapura pada tahun 2025:

1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp2.733.762.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp12.804.796.000,-

Total alokasi anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target indikator kinerja adalah sebesar Rp15.538.558.000,-. Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pagu efektif menjadi sebesar Rp12.702.394.000,-. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp12.526.374.331,- atau sebesar 98,61% dari pagu efektif, serta 80,61% dari pagu awal. Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp659.353.236,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,-.

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 80,61% terhadap pagu anggaran (OMSPAN) dan 98,61% terhadap pagu efektif (SAKTI) didukung oleh beberapa faktor strategis. Salah satu faktor utama adalah tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala dan terstruktur, setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan dengan baik sehingga penggunaan

anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, proses pencairan anggaran yang terpantau secara optimal turut berkontribusi terhadap kelancaran realisasi anggaran, karena memastikan pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) serta Rencana Penarikan Dana (RPD). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, sistem yang responsif memungkinkan permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti melalui langkah korektif yang cepat dan tepat, sehingga potensi hambatan dapat diminimalkan dan capaian kinerja dapat dioptimalkan.

Selama tahun anggaran 2025 terdapat 10 (sepuluh) kali revisi DIPA dan RKAKL. Revisi bertujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja. Revisi DIPA dan RKAKL tersebut antara lain :

1. Revisi 1 tanggal 7 Februari 2025 DS:9997-4103-8722-0134 Pengalokasian Gaji Non ASN.
2. Revisi 2 tanggal 21 Februari 2025 DS:4290-8310-2745-6721 revisi terkait efisiensi kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, nilai efisiensi sebesar Rp2.925.764.000,-.
3. Revisi 3 tanggal 19 April 2025 DS:4290-8310-2745-6721 revisi terkait pemutakhiran data POK.
4. Revisi 4 tanggal 07 Juli 2025 DS : 4290-8310-2745-6721 dalam rangka pemutakhiran POK dan revisi halaman III DIPA untuk penilaian IKPA Triwulan III Tahun 2025.
5. Revisi 5 tanggal 31 Juli 2025 DS : 0001-0554-8040-7162. Revisi dalam hal Pagu tetap untuk memenuhi program prioritas hal Penyelesaian Usulan Revisi Relaksasi Blokir.
6. Revisi 6 tanggal 3 Oktober 2025 DS:0001-0554-8040-7162, revisi Pemutakhiran POK dan Penyesuaian Halaman iii DIPA Triwulan IV 2025.
7. Revisi 7 tanggal 23 Oktober 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK pada Gaji dan tunjangan dalam rangka pendistribusian anggaran untuk gaji PPPK Tahap I dan PPPK Optimalisasi.
8. Revisi 8 tanggal 28 Oktober 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK pada anggaran gaji dan tunjangan dalam rangka penambahan akun 511633 untuk belanja tunjangan umum PPPK.



9. Revisi 9 tanggal 28 November 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi pemutakhiran POK dan penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai.
10. Revisi 10 tanggal 10 Desember 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran untuk kegiatan layanan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang serta optimalisasi gaji PPPK paruh waktu.

Rencana kinerja tahunan masih disusun berdasarkan revisi rencana aksi kegiatan tahun 2023-2024 dengan tambahan tahun 2025 dikarenakan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes tahun 2025 - 2029 karena belum terdapat penetapan indikator untuk Balai Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Renstra Kemenkes 2025-2029. Berikut adalah tabel target rencana kinerja tahun 2020-2025:

Tabel 2. Distribusi Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
BKK Kelas I Jayapura Tahun 2020 s.d 2025

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara.	● Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara ● Range indeks 0-1 ● Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) ● Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi skor minimal) ● Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni: 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	14,63 4	13.597	0.92	0,92	0,94	0,96

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	90%	95%	97%	98%	99%	99%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan resiko lingkungan dalam satu tahun (Berdasarkan jumlah pintu masuk negara)	● Mengukur status pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara ● Range indeks 0-1 ● Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) ● Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi skor minimal) 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia	85%	90%	0,86	0,87	0,90	0,91

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis						
4	Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik (E Monev DJA)	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	80	83	88	90	90	90
5	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan	Perhitungan bobot 8 parameter yakni revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	80	93	93	94	95	93



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi							
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assessment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	70	72	75	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	45%	80%	80%	82%	94%	95%
8	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	-	-	-	95%	96%	96%

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja atau penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan Kepala BKK Kelas I Jayapura kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran BKK Kelas I Jayapura pada Tahun 2025. Penetapan Kinerja BKK Kelas I Jayapura masih disusun berdasarkan dokumen revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura Tahun 2022 - 2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2025. Penetapan Kinerja BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Kepala BKK Kelas I Jayapura pada akhir tahun 2024 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL November 2024. Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai BKK Kelas I Jayapura dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Sasaran Strategis		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,88 Indeks
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,91 Indeks
B	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	98 Nilai 96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	90 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Nilai
		Kinerja implementasi WBK satker	75 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95 Persen
		Persentase realisasi anggaran	96 Persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan hasil dari kegiatan manajerial yang bisa terukur. Pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura dalam kurun waktu tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh melalui penghitungan jumlah pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kinerja, baik input maupun output, yaitu membandingkan data rencana tingkat capaian (target) dengan data realisasi, baik jumlah anggaran maupun jumlah satuannya. Sedangkan pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui survei dan biasanya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu yang disesuaikan dengan jenis penyakit serta perkiraan waktu keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BKK Kelas I Jayapura tahun 2025, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu terkendalinya seluruh kondisi potensial sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan Pos Lintas Batas Negara dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Dibawah ini akan disampaikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,88	0,90	102
			a. Pemeriksaan Orang	2.386.843	2.489.180	104
			b. Pemeriksaan Alat Angkut	781	797	102
			c. Pemeriksaan Barang	682	695	102
			d. Pemeriksaan Lingkungan	2094	2124	101

		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	100%	101
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,91	1	110
		a.	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%	100%	
		b.	Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal <1	100%	1000%	
		c.	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100%	100%	
		d.	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%	80%	
		e.	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	80%	100%	
		f.	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	80%	100%	
		g.	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	60%	100%	
		h.	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	100%	104%	
		i.	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	100%	115%	



			j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%	100%	
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90	98,23	109
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	97,08	104
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	87,08	116
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	98%	103%
		8	Persentase realisasi anggaran	96%	80,61%	84
Rata – Rata Capaian						104%

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 (delapan) indikator pada PK BKK Kelas I Jayapura, dari 8 (delapan) indikator yang mencapai target sebanyak 7 (tujuh) indikator dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

1. Indikator 1 : Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN

a. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN adalah mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara. Dihitung dengan range indeks 0-1, bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi skor minimal). Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni: Persentase orang yang diperiksa sesuai standar, Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, Persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

$$Index = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

S = Score
 S_{max} = Score maximal
 S_{min} = Score minimal

1. Score dihitung dari bobot x cakupan (*coverage*)
2. Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (*coverage max*)
3. Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (*coverage min*)
4. Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN yakni :
 - a) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar
 - b) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
 - c) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar
 - d) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

d. Capaian Indikator**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Cara hitung kinerja: Kinerja deteksi dini faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN, dihitung dengan nilai range indeks 0-1. Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni: Persentase orang yang diperiksa sesuai standar, Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, Persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 0,88

Realisasi : 0,90

Capaian Kinerja : 102%

Realisasi Indikator	x 100%
Target Indikator	

Capaian indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN Tahun 2025, dari target nilai indeks 0,88 terealisasi 0,90 dengan capaian kinerja 102 %.

Tabel 5. Distribusi Capaian Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks deteksi faktor risiko di bandara/ pelabuhan/PLBN	0,88	0,90	102

Realisasi target dari indikator indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN Tahun 2025 sebesar 0,90 dari target 0,88 dengan capaian 102%. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan beberapa sumber data pada setiap parameter, sumber data berasal dari 4 tim kerja pada BKK antara lain tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan, tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dan tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus.

Realisasi indikator ini melebihi target karena adanya peningkatan layanan dari setiap parameternya. Pada parameter pemeriksaan orang dipengaruhi oleh peningkatan pengawasan crew pesawat, jumlah kunjungan poliklinik serta deteksi malaria di wilayah kerja. Demikian juga pada pemeriksaan alat angkut khususnya pesawat dari luar negeri, pemeriksaan barang (jenazah) serta pemeriksaan lingkungan (survey vektor) terjadi peningkatan dengan capaian lebih dari 100% dari target parameter yang ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Tabel 6. Distribusi Perbandingan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025

NO	INDIKATOR SATKER	TAHUN				
		2023	2024	2025		
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN					
a	Pemeriksaan Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) (Bandara, Pelabuhan, PLBN)	2.366.013	2.865.704	2.386.843	2.489.180	104
1	Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN (Pelabuhan dan Bandara)	2.173.658	2.637.529	2.196.261	2.225.917	101
2	Pemeriksaan crew pesawat (termasuk ICV personil kedatangan)	143.393	176.841	142.237	213.674	150
3	Pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV awak kapal)	45.675	48.136	45.265	46.176	102
4	Data kunjungan poliklinik bukan penumpang (Pelabuhan dan Bandara)	1.658	1.755	1.700	1.872	110
5	Laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja (Pelabuhan, Bandara PLBN)	182	184	180	183	101
6	HIV disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	333	312	300	300	100
7	TB di sekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	403	336	300	300	100

NO	INDIKATOR SATKER		TAHUN				
			2023	2024	2025		
			REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8	Malaria di sekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	711	611	600	678	126
	b	Pemeriksaan Alat Angkut (pesawat dan kapal)	901	927	781	797	102
	1	Gendec terverifikasi (ttd/stempel)	23	27	18	23	128
	2	COP (kedatangan)	24	12	28	28	100
	3	PHQC (keberangkatan)	854	860	734	746	102
	4	GCDH (PLBDN)	0	28	1	0	0
	c	Pemeriksaan Barang (Jenazah)	792	719	682	695	102
	1	Ijin angkut jenazah	792	719	682	695	102
	d	Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor) (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)	1.279	1.406	2.094	2.124	101
	1	Form inspeksi kesling TTU	286	324	326	326	100
	2	Form inspeksi kesling TPP	635	690	727	727	100
	3	Form inspeksi kesling ISPAB	2	2	671	671	100
	4	Form inspeksi kesling air (lokus)	2	2	10	10	100
	5	Rekapitulasi hasil survei vektor (bandara/ pelabuhan)	354	388	360	390	108

Realisasi kegiatan deteksi faktor risiko di bandara/pelabuhan/PLBN Selama periode 2023 sampai Tahun 2025, telah diatas 100% melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas orang di pintu masuk (bandara/pelabuhan/PLBN) khususnya pada Tahun 2024 dan 2025, selain itu kegiatan surveilans orang, alat angkut, barang, dan lingkungan

telah berjalan optimal dengan adanya peningkatan realisasi pada beberapa kegiatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada pemeriksaan orang di pintu masuk terjadi peningkatan pemeriksaan pada crew pesawat dikarenakan meningkatnya jumlah pesawat dari luar negeri, pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik serta pemeriksaan malaria di wilayah buffer juga mengalami peningkatan 6-10% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penguatan pengawasan terhadap penyakit menular dengan mitigasi risiko penyakit menular maupun importasi penyakit.

Parameter pemeriksaan alat angkut juga melebihi target, khususnya pada kegiatan pengawasan pesawat dari luar negeri yaitu verifikasi Gendec dengan capaian 128% sedangkan pada kegiatan pengawasan GCDH realisasi masih 0 dikarenakan belum adanya perlintasan langsung kendaraan dari Indonesia ke Papua New Guinea. Meskipun MoU dan SOP terkait perlintasan alat angkut lintas batas negara di PLBN Skouw telah ada, tetapi terminal alat angkut di perbatasan, Papua New Guinea belum siap beroperasi sehingga uji coba perlintasan kendaraan darat belum dapat dilakukan pada tahun ini.

Realisasi parameter pemeriksaan barang (jenazah) Tahun 2025 menurun sebanyak 3% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, meskipun demikian realisasi ini melebihi target yang ditetapkan di Tahun 2025 dengan capaian 102%. Tidak adanya lonjakan signifikan terkait jumlah pengawasan jenazah menunjukkan situasi risiko relatif stabil dan konsistensi dalam pengawasan risiko kesehatan dari repatriasi jenazah.

Realisasi parameter pemeriksaan lingkungan Tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 40% jika dibandingkan Tahun 2023 dan 2024. Kegiatan pemeriksaan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) dan Tempat-Tempat Umum (TTU) telah mencapai target 100% dengan jumlah pengawasan mengalami peningkatan 5% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perluasan pengawasan pada TPP, TTU serta lokus inspeksi air dan ISPAB yang ada di wilayah kerja dalam mencegah risiko kesehatan berbasis lingkungan. Kegiatan survey vektor juga menunjukkan progress yang positif dengan capaian 108% mengindikasikan peningkatan pemantauan dalam mencegah risiko penyakit zoonosis.

Secara keseluruhan, capaian setiap parameter pada indikator 1 di Tahun 2025 telah mencapai target bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan



telah dilakukan dengan efektif, responsif, dan konsisten dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan menjaga kesehatan di pintu masuk negara

Grafik 7. Perbandingan Persentase Capaian Parameter Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025



Target indikator indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN terus menunjukkan tren yang positif dengan realisasi selalu melampaui target setiap tahunnya. Tahun 2023 merupakan realisasi tertinggi dengan nilai indeks 1,00 sedangkan Tahun 2024 meskipun realisasi sedikit menurun dari Tahun 2023 namun tetap melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 103 %. Kualitas deteksi dini dan pelaksanaan pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan masih berjalan dengan optimal meskipun terdapat penurunan jumlah alat angkut dari luar negeri.

Pada Tahun 2025 terjadi penyesuaian target menjadi lebih rendah tetapi realisasi tetap melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 102%. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti penurunan jumlah kapal dan penumpang kapal serta masih tertundanya pelaksanaan lalu lintas alat angkut lintas batas negara di PLBN Skouw karena belum siapnya operasional terminal di Papua New Guinea namun terus dilakukan adaptasi terhadap tantangan dan perubahan situasi tanpa menurunkan kualitas pengawasan di pintu masuk misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu, segera menindaklanjuti setiap temuan faktor risiko di lapangan serta meningkatkan capaian parameter lainnya pada indikator ini. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja dan pencapaian target indikator serta optimalisasi kesiapsiagaan dalam deteksi faktor risiko kesehatan di pintu masuk.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Perbandingan capaian kinerja dengan satker sejenis dilakukan dengan membandingkan capaian BKK Kelas I Jayapura dengan satker BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang, dan BKK Kelas I Ambon. Ketiga BKK tersebut dipilih sebagai pembanding karena memiliki karakteristik BKK yang sama yaitu merupakan BKK Kelas I dan memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara, dan PLBN sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi memiliki kecenderungan yang sama.

Jika dibandingkan dengan capaian BKK lain yang setara, untuk indikator indeks deteksi faktor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBN, capaian BKK Jayapura (102%) masih dibawah capaian BKK Ambon 108%, tetapi lebih tinggi dari capaian BKK Pontianak (101%) dan setara dengan capaian BKK Kupang (102%). Hal ini dikarenakan karakteristik mobilitas dan jumlah lalu lintas alat angkut di wilayah kerja BKK Ambon relatif lebih konsisten dengan jumlah pengawasan yang lebih tinggi sedangkan di BKK Jayapura jumlah pengawasan alat angkut lebih bervariasi dan tidak selalu tinggi di setiap periodenya. Pada BKK Pontianak penerbitan *Health Certificate* (OMKABA) berkontribusi pada pencapaian jumlah pemeriksaan barang dimana kegiatan ini belum dapat dilakukan di BKK Jayapura.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Ambon, BKK Pontianak, dan BKK Kupang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KLS I AMBON		BKK KLS I KUPANG		BKK KLS I JAYAPURA		BKK KELAS I PONTIANAK		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko Penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN	0,93	1 (108%)	0,95	0,97 (102%)	0,88	0,90 (102%)	0,94	0,95 (101%)	Capaian BKK Jayapura masih dibawah BKK Ambon namun lebih tinggi dari capaian BKK Pontianak, dikarenakan karakteristik mobilitas dan jumlah lalu lintas alat angkut relatif berbeda.

4) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Tabel 8. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah (RAK) BKK Kelas I Jayapura

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH				TAHUN 2025	
	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,92	0,92	0,95	0,96	0,88	0,90

Perbandingan rencana jangka menengah saat ini masih menggunakan target RAK tahun 2022 – 2024 yang disusun pada tahun 2022 karena rencana jangka menengah (RAK) tahun 2025 belum ada. Berdasarkan tabel di atas penetapan target untuk indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai indeks 0,92 ditingkatkan menjadi 0,95 pada tahun 2024.

Realisasi tahun 2025 meskipun melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian 102% namun realisasi tersebut masih lebih rendah dari target rencana jangka menengah. Realisasi 2025 mengalami penurunan 2% dibandingkan tahun 2022-2024. Terdapat tantangan dan perubahan situasi di lapangan seperti mobilitas dan volume lalu lintas kapal dan penumpang yang mengalami penurunan serta tertundanya pelaksanaan lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) mempengaruhi penyesuaian target indikator. Upaya dan strategi telah dilakukan dalam menjawab tantangan tersebut sehingga realisasi (0,90) dari indikator deteksi faktor risiko orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di bandara/pelabuhan/PLBN dapat melebihi target (0,88) yang ditetapkan.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya mencapai indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk (Bandara/Pelabuhan/PLBN) dilakukan melalui kegiatan antara lain:

1. Pemeriksaan Orang yang meliputi :

- a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan penumpang datang dan berangkat pada semua kapal dan pesawat baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan melakukan pengamatan tanda dan gejala penyakit potensial Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermal scanner*, pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang, dan melakukan surveilans epidemiologi pada orang.
- b) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan crew pesawat dan awak kapal dari dalam dan luar negeri dengan melakukan pengamatan tanda dan gejala penyakit potensial KKM melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermal scanner*, medec crew, dan pemeriksaan dokumen kesehatan (ICV).
- c) Meningkatkan pelayanan di Poliklinik BKK Kelas I Jayapura yang ada di wilayah kerja dengan menambah ketersediaan obat-obatan, bahan pemeriksaan dan perbaikan sarana dan prasarana di poliklinik, sehingga lebih banyak masyarakat di pelabuhan, bandara, dan PLBN yang terlayani.
- d) Kolaborasi dan sinergitas dengan stakeholder pada event instansi dan event sosial dengan melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan.
- e) Pemeriksaan kesehatan pada semua penjamah makanan di semua Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.
- f) Melakukan kegiatan screening TB, HIV, dan malaria pada masyarakat dan *stakeholder* di semua wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura.
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap minggu.

2. Pemeriksaan Alat Angkut

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan pada semua pesawat yang datang dari luar negeri atau daerah terjangkit KKM untuk melakukan pemeriksaan *General Declaration (gendec)* dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya penumpang atau crew yang menderita penyakit menular selama penerbangan.
- b) Melakukan pemeriksaan pada semua kapal yang masuk ke wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura baik datang dari luar negeri maupun dari daerah terjangkit KKM serta meningkatkan pengawasan baik dengan pemeriksaan



langsung maupun pengawasan *Risk Based Assessment* (RBA) terhadap faktor risiko kesehatan pada kapal (kepadatan vektor/BPP dan penyakit menular) dengan menerbitkan *Certificate Of Pratique* (COP) sebagai outputnya.

- c) Segera melakukan tindakan pengendalian dan mitigasi risiko saat ditemukan faktor risiko kesehatan dari hasil pengawasan dan pemeriksaan alat angkut.
- d) Melakukan pemeriksaan pada semua kapal berangkat di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura dengan menerbitkan dokumen *Port Health Quarantine Certificate* (PHQC) sebagai outputnya.
- e) Aktif berkoordinasi dan membangun sinergitas dengan lintas sektor kemaritiman, bandara, dan PLBN.
- f) Melakukan monitoring capaian dan evaluasi kegiatan setiap minggu.

3. Pemeriksaan Barang

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator pemeriksaan barang (jenazah/kerangka) sesuai standar karantina yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan pemetian dan dokumen kekarantinaan terhadap semua jenazah/kerangka yang akan diberangkatkan dari wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura.
- b) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang (jenazah/kerangka) dari luar negeri.
- c) Menambah jumlah petugas pemeriksaan barang dan membuat jadwal piket.
- d) Melakukan koordinasi dan edukasi terhadap agen/jasa pemetian dan pihak pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit.

4. Pemeriksaan Lingkungan

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator pemeriksaan lingkungan yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu pemeriksaan Hygiene Sanitasi Gedung dan Bangunan (HSGB) pada gedung terminal pelabuhan dan bandara, perkantoran, rumah ibadah, dan penginapan/hotel, yang berada di semua wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura setiap bulan.
- b) Menetapkan jumlah minimal TPP yang akan diperiksa setiap bulan pada masing-masing wilayah kerja.



- c) Melakukan Inspeksi Sanitasi Penyediaan Air Bersih (ISPAB) pada TPP di semua wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura.
- d) Melakukan Inspeksi kesehatan lingkungan air (1 lokus) di wilayah Pelabuhan Jayapura dengan melakukan dengan melakukan 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologis.
- e) Melakukan survei vektor penyakit pes (pemasangan perangkap tikus, identifikasi tikus dan pinjal), penyakit DBD (survei larva *Aedes sp*), penyakit malaria (survei larva dan nyamuk *Anopheles sp*) dan penyakit diare (survei lalat dan kecoa) di semua wilayah kerja sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah disusun.
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi mingguan hasil kegiatan pemeriksaan lingkungan yang telah dilakukan.
- g) Segera melakukan tindak lanjut atau rekomendasi dari pemeriksaan lingkungan jika didapatkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi nilai standar baku mutu kesehatan lingkungan.
- i) Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/webinar/ sosialisasi baik daring maupun luring.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan dalam Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk



Pengawasan & Pemeriksaan Orang



Pengawasan & Pemeriksaan Alat Angkut

Pengawasan & Pemeriksaan Barang



Pemeriksaan Lingkungan

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Adanya tantangan perubahan mobilitas dan volume lalu lintas kapal dan penumpang membutuhkan adaptasi strategi yang cepat untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun keberhasilan pelaksanaan indikator ini dengan mengupayakan beberapa strategi seperti :

1. Monitoring dan evaluasi mingguan terhadap realisasi kegiatan sehingga hasil kegiatan dapat terus terpantau dan masalah yang ada segera ditindaklanjuti.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lintas sektor di pelabuhan/bandara/PLBN termasuk lintas sektor di wilayah seperti dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas dengan ikut terlibat dalam setiap rapat koordinasi maupun dalam event instansi.
3. Penetapan target minimal jumlah pemeriksaan lokus tempat pengolahan pangan dan hygiene sanitasi gedung dan bangunan pada masing-masing wilayah kerja.
4. Mendorong kepatuhan pelayaran dan maskapai dalam penyampaian dokumen kesehatan seperti gendec, ICV, dan laporan kesehatan penumpang melalui sosialisasi pada media sosial maupun penyampaian langsung ke agen atau maskapai.
5. Meningkatkan ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan kesehatan yang berdampak positif pada peningkatan kunjungan poliklinik dan skrining penyakit menular.
6. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan baik luring maupun daring melalui LMS, terkait surveilans dan identifikasi faktor risiko serta melakukan penjadwalan piket yang adaptif pada momen tertentu (*high season*).

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

1. Terdapat penurunan jumlah penerbitan PHQC dikarenakan frekuensi lalu lintas kapal di Jayapura menurun akibat kebijakan pemerintah terkait anggaran yang berdampak di sektor perdagangan dan transportasi.
2. Masih terjadi revisi rekonsiliasi data alat angkut antara induk dengan wilker dan masih ditemukan kekurangan persyaratan dokumen kesehatan kapal yang diupload oleh agen kapal di SINKARKES
3. Pelaksanaan skrining TB dan HIV pada beberapa wilayah kerja pelaksanaannya tidak sesuai dengan RPK yang telah disusun, sehingga mundur di bulan berikutnya dikarenakan belum tersedianya logistik kegiatan.

4. Belum terlaksananya lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di PLBN Skouw sehingga belum ada perlintasan langsung kendaraan dari Indonesia (Jayapura) ke Papua New Guinea (Vanimo). Hal ini mempengaruhi pencapaian parameter pemeriksaan alat angkut karena GCDH belum dapat terealisasi.

h. Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan pengawasan alat angkut (kapal) baik melalui metode *Risk Based Assessment* (RBA) di SINKARKES maupun pengawasan secara terpadu dengan stakeholder kemaritiman di Pelabuhan Jayapura.
2. Melakukan monitoring data alat angkut secara mingguan dan melakukan sosialisasi terkait *Risk Based Assessment* pada agen kapal secara daring dan luring.
3. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan skrining TB dan HIV serta terus melakukan monitoring kesiapan alat dan bahan medis serta aktif berkoordinasi dengan lintas sektor.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas CIQS di wilayah kerja PLBN Skouw termasuk CIQS yang ada di wilayah Papua New Guinea dengan aktif mengikuti rapat koordinasi dan pertemuan di PLBN Skouw serta mendorong percepatan pelaksanaan lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) dalam berbagai forum pertemuan seperti forum bilateral *Border Liaison Meeting* (BLM).

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk (Bandara/Pelabuhan/PLBN) pada Tahun 2025, terealisasi 0,90 dari target 0,88 dengan capaian kinerja 102%. Realisasi anggaran sebesar Rp 330.478.000,- atau 46,34% dari pagu efektif indikator Rp 339.420.000,- sehingga terdapat efisiensi 61%. Perhitungan efisiensi anggaran untuk indikator ini, sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$E = \frac{((339.420.000 \times 102) - 330.478.000)}{(339.420.000 \times 102)} \times 100\% = 0,05$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,05}{20} \times 50 \right) = 61\%$$

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai efisiensi (NE) untuk indikator indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN sebesar 61%. Perhitungan nilai efisiensi menggunakan pagu efektif bukan pagu total (anggaran diblokir 52% dari pagu indikator).

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara maksimal dalam mencapai target indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pada wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah epidemiolog, dokter, perawat, pranata laboratorium kesehatan, sanitarian dan entomolog. Selain itu adanya jabatan fungsional ahli madya dan tenaga teknis dengan pendidikan magister menambah ketajaman identifikasi faktor risiko, perencanaan strategi atau program dan analisa dari setiap permasalahan dan tantangan di lapangan.

Tenaga teknis tersebut juga aktif meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan dan webinar seperti Analisis dan Visualisasi Data, Penguatan Health Regulating & Vaccination for Travellers, Hygiene Sanitasi bagi Penjamah Makanan, Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, Peran Karantina Kesehatan dalam Cegah Tangkal penyakit di Pintu Masuk, Webinar Kewaspadaan Meningitis Meningokokokus dan MERS serta Cegah Penularan,

Pelatihan Dasar Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, Pelatihan Penanggulangan TBC, Tatalaksana Tuberculosis, Dasar Transportasi dan Pengiriman Spesimen Bahan Infeksius, Skrining Laboratorium Berbagai Kasus, Higiene dan Sanitasi Pangan Karakteristik Mikrobiologi Pangan, Pengawasan Kualitas Air Minum, Surveilans Reservoir Penyakit Pes dan Leptospirosis, dan pelatihan lainnya yang berhubungan dengan indikator deteksi faktor risiko di pintu masuk.

2. Indikator 2 : Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan

a. Pengertian

Indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun sesuai hasil temuan indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	X 100 %
Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Cara hitung kinerja : Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan dibagi jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

Rumus :

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	X 100 %
Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	

$$\frac{2.016}{2.019} \times 100\% = 100$$

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan mencapai 2.016 sedangkan jumlah faktor risiko yang ditemukan sebanyak 2.019, sehingga persentase faktor risiko yang dikendalikan terhadap faktor risiko yang ditemukan pada tahun 2025 mencapai 100%.

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 99%

Realisasi : 100%

Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\% = \frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

Realisasi indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tahun 2025 adalah 100% sedangkan target capaian adalah 99%, sehingga didapatkan capaian kinerja tahun 2025 mencapai 101%. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan beberapa sumber data pada setiap parameter, sumber data berasal dari 3 tim kerja pada BKK antara lain tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dan tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus.

Tabel 9. Distribusi Capaian Indikator Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

N O	INDIKATOR	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	PROYEKSI TAHUN 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	100%	101%

Pada tahun 2025, target indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan ditetapkan sebesar 99%, sedangkan realisasinya mencapai 100%, sehingga capaian

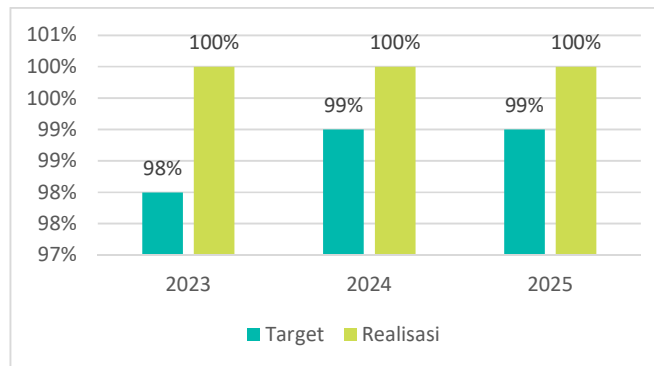
kinerja pada tahun 2025 sebesar 101%. Nilai capaian kinerja ini dipengaruhi oleh besarnya target yang ditetapkan serta realisasi yang diperoleh.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

Tabel 10. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR SATKER	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%	Realisasi indikator persentase faktor risiko yang berhasil dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan pada tahun 2025 mencapai 100%, sama dengan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BKK Jayapura secara konsisten, selama tiga tahun terakhir, mampu menindaklanjuti seluruh faktor risiko yang teridentifikasi.

Grafik 8. Data Perbandingan Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 s.d Tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura



Perbandingan antara target dan realisasi indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama periode 2023–2025 menunjukkan tren kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 98% dengan realisasi mencapai 100%. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025, target kinerja meningkat menjadi 99%, sementara realisasi kinerja pada kedua tahun tersebut tetap mencapai 100%. Realisasi kinerja indikator pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang setara dengan tahun 2023 dan 2024, meskipun target kinerja pada tahun 2024 dan 2025 lebih tinggi dibandingkan target pada tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Dalam analisis perbandingan dengan satuan kerja sejenis, BKK Kelas I Jayapura membandingkan capaian kinerjanya dengan BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak, dan BKK Kelas I Ambon. Pemilihan ketiga satuan kerja tersebut sebagai pembanding didasarkan pada kesamaan klasifikasi sebagai Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I serta kesamaan karakteristik pintu masuk wilayah kerja, yaitu pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sehingga kompleksitas permasalahan kesehatan yang dihadapi relatif sebanding.

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di BKK Kelas I Jayapura mencapai 100%. Capaian tersebut setara dengan realisasi kinerja pada BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak, dan BKK Kelas I Ambon,

yang masing-masing juga mencapai 100% pada indikator yang sama. Dengan demikian, capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura pada indikator tersebut menunjukkan tingkat kinerja yang sejajar dengan satuan kerja sejenis.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Pontianak, BKK Kupang, dan BKK Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	100% (101%)	98%	100% (102%)	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	Proyeksi tahun 2025 untuk indikator faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan telah mencapai target di BKK Kelas I Pontianak dan BKK Kelas I Ambon, sementara BKK Kelas I Jayapura dan BKK Kelas I Kupang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh penetapan target yang maksimal di BKK Kelas I Ambon dan BKK Kelas I Pontianak.

Realisasi kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di BKK Kelas I Jayapura pada tahun 2025 mencapai 100%. Capaian tersebut setara dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak, dan BKK Kelas I Ambon, yang masing-masing juga mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura pada indikator tersebut menunjukkan tingkat kinerja yang sebanding dengan satuan kerja sejenis.

4) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target rencana jangka menengah disusun berdasarkan Renstra 2025–2025. Berdasarkan tabel, realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di BKK

Kelas I Jayapura telah melampaui target satker tahun 2025 dan target rencana jangka menengah untuk tahun 2025.

Tabel 12. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH					TAHUN 2025	
	2025	2026	2027	2028	2029	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	94%	96%	97%	98%	100%	99%	100%

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA KEMENKES 2025	TAHUN 2025	
			TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	94%	99%	100%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dengan target jangka standar nasional. Realisasi indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di BKK Kelas I Jayapura telah melampaui target satker tahun 2025 dan target Renstra Kemenkes tahun 2025.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, melalui kegiatan antara lain:

1. Faktor Risiko yang ditemukan pada Orang

Faktor risiko yang ditemukan pada orang selama tahun 2025 ditemukan sebanyak 2.003 faktor risiko yang kemudian dikendalikan dengan rincian sebagai berikut :

- a) penerbitan dokumen izin angkut orang sakit pada tahun sebanyak 1.697 dokumen dan dokumen laik terbang bagi ibu hamil berisiko sebanyak 53 dokumen. Serta surat tolak berangkat sebanyak 157 dokumen bagi orang sakit dan ibu hamil berisiko yang tidak layak berangkat menggunakan kapal atau pesawat.
 - b) Pengobatan malaria pada pasien dengan hasil pemeriksaan malaria positif untuk 87 orang dan surat pengantar/ rujukan sebanyak 4 orang untuk mendapatkan pengobatan malaria di Puskesmas Skouw.
 - c) Rujukan ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan bagi *stakeholder* dan Masyarakat dengan hasil skrining terduga TB dan reaktif HIV.
2. Faktor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan alat angkut

Selama tahun 2025, ditemukan tiga faktor risiko pada alat angkut, yaitu keberadaan vektor kecoa dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Kapal yang teridentifikasi antara lain:

- a) KM. Cantika Lestari 77 pada bulan Januari.
- b) KM. Sabuk Nusantara 81 pada bulan Maret.
- c) KM. Sabuk Nusantara 100 pada bulan April, juni, juli, agustus, September.
- d) Sabuk Nusantara 45 pada bulan juni dan September.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap temuan tersebut, dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

- a) Memberikan stempel One Month Extension (OME) pada SSCEC keempat kapal yang ditemukan vektor kecoa dengan kepadatan tinggi.
- b) Melakukan disinfeksi pada KM. Sabuk Nusantara 81, Sabuk Nusantara 45 dan Sabuk Nusantara 100 dan selanjutnya diterbitkan dokumen SSCC.
- c) Sementara itu, KM. Cantika Lestari 77 tidak dilakukan disinfeksi di Pelabuhan Laut Jayapura, karena kapal tersebut akan melaksanakan proses docking di pelabuhan tujuan berikutnya.

3. Faktor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan barang

Pemeriksaan barang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah, untuk diterbitkan izin angkut jenazah. Pengawasan jenazah dilakukan untuk melihat faktor risiko, seperti penyebab kematian yang terkait dengan penyakit menular, penyakit potensial wabah, serta kelengkapan dokumen pengiriman jenazah. Apabila ditemukan jenazah dengan penyakit menular, penyakit potensial wabah dan tidak lengkap dokumen terhadap jenazah tersebut maka tidak akan diberangkatkan atau tunda berangkat sampai dengan dokumen terlengkapi. Pada tahun 2025 ditemukan satu kasus jenazah dengan penyebab kematian akibat penyakit menular, yaitu Tuberkulosis Paru, yang diberangkatkan melalui wilayah kerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Selain itu, pada bulan September 2025 dilaporkan kejadian penyakit menular Tuberkulosis dan malaria di wilayah Jayapura dan Sentani, dengan satu jenazah tiba melalui PLBN Skouw. Sebagai tindak pengendalian risiko kesehatan, dilakukan penanganan jenazah sesuai dengan standar kekarantina kesehatan, yaitu menggunakan peti jenazah yang tertutup rapat (air tight) dan dilakukan penyolderan untuk mencegah potensi penularan penyakit.

4. Faktor risiko yang ditemukan pada hasil pemeriksaan lingkungan :

- a) TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan) yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi : meliputi pemeriksaan HSGB (Hygiene Sanitasi Gedung Bangunan) pada perkantoran, rumah ibadah, Gedung terminal. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan lingkungan luar/halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, pengendalian vektor, instalasi listrik, pemadam kebakaran, air bersih, air kotor, penangkal petir, serta pemeliharaan jamban dan kamar mandi. Pada tahun 2025 tidak ditemukan TTU yang tidak memenuhi syarat.
- b) Air (e coli, MPN *coliform*, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi : meliputi pemeriksaan Sumber Air Bersih, Distribusi perpipaan, untuk menentukan apakah terdapat risiko pencemaran air dan sejauh mana tingkat risiko pencemaran. Pemeriksaan kualitas air secara fisik dengan pengamatan warna, rasa, bau, suhu dan TDS. Secara kimia dengan pengukuran pH, Sisa Chlor, Nitrat. Nitrit,



Ammonia, Phospat. Secara bakteriologis dengan pengambilan sampel air untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jumlah cemaran e.coli dan coliform dengan metode MPN (Most Probable Number). Pada tahun 2025 tidak ditemukan hasil pemeriksaan air yang tidak memenuhi syarat.

Gambar 3. Dokumentasi Faktor Risiko Yang Dikendalikan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

Pemeriksaan Orang Sakit dan Ibu Hamil Berisiko



Tindakan Disinseksi Pada Alat Angkut



Pemeriksaan Jenazah



Pemeriksaan TTU



f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Pada indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dianggap berhasil karena melebihi target yang ditetapkan. Adapun keberhasilan pelaksanaan indikator ini dikarenakan:

1. Adanya dukungan dari dinas kesehatan kota Jayapura berupa obat-obatan malaria yang digunakan untuk pengobatan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif malaria.
2. Adanya dukungan dari Puskesmas Skouw untuk memberikan pengobatan

pada pasien dengan hasil pemeriksaan malaria positif yang belum mendapatkan pengobatan di klinik BKK Jayapura wilayah kerja Skouw.

3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan konselor HIV dan TB di Puskesmas dalam rangka memastikan tindak lanjut pemeriksaan bagi terduga TB serta peserta dengan hasil reaktif HIV dapat dilaksanakan.
4. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengelola TPP dan stakeholder sehingga pemeriksaan faktor risiko lingkungan (TTU, TPM dan kualitas air) dapat dilaksanakan setiap bulan.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

1. Pemeriksaan Orang
 - a) Kurangnya SDM (tenaga medis dan paramedis) khususnya di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura (Kantor induk).
 - b) Belum optimalnya pos pelayanan kesehatan di Pelabuhan Jayapura untuk melaksanakan pemeriksaan orang sakit dikarenakan akses keluar dan masuk sulit untuk orang sakit pada saat penumpang banyak.
2. Pemeriksaan Alat Angkut
 - a) Pemeriksaan alat angkut lengkap atau tidak sesuai ketentuan pada aplikasi SINKARKES. Belum optimalnya pengawasan alat angkut melalui RBA (*Risk Based Assessment*) di SINKARKES, karena masih terdapat agen pelayaran yang belum mengunggah dokumen Kesehatan kapal dengan lengkap atau tidak sesuai ketentuan pada aplikasi SINKARKES.
3. Pemeriksaan Lingkungan

Kurangnya kesadaran penjamah makanan untuk menggunakan APD saat mengolah dan menyajikan makanan.

h. Pemecahan Masalah

1. Pemeriksaan Orang
 - a. Pemerataan SDM (medis dan paramedis) di induk dan wilker berdasarkan beban kerja.
 - b. Membuat usulan formasi baik melalui pengangkatan CASN atau *job vacancy* berdasarkan analisis beban kerja.
2. Pemeriksaan Alat Angkut

Meningkatkan sosialisasi bagi *stakeholder* (agen pelayaran/ Nakhoda)



tentang penginputan *Risk Based Assessment* (RBA) dan pengisian Maritim Declaration Health (MDH) pada aplikasi sinkarkes.

3. Pemeriksaan Lingkungan

- Memastikan penjamah makanan menggunakan APD saat mengolah dan menyajikan makanan melalui uji sampling setiap bulan.
- Telah melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura berkaitan jadwal pelatihan terhadap penjamah makanan namun sampai saat ini belum ada jadwal pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Realisasi kinerja Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 99% dengan nilai capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101%. Realisasi anggaran untuk indikator faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar Rp. 345.515.350,- dari total pagu Rp 833.183.000,-. Indikator persentase yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah terlaksana efisien dengan nilai efisiensi sebesar 53% dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran belanja negara.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$E = \frac{((345.791.000 \times 101) - 345.515.350)}{(345.791.000 \times 101)} \times 100\% = 0.01$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0.01}{20} \times 50 \right) = 53\%$$

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang,

alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah epidemiolog, sanitarian, entomolog, dokter, perawat dan pranata laboratorium kesehatan.

Peningkatan kompetensi teknis yang diikuti untuk mendukung capaian indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan antara lain : Pelatihan Dasar Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Menular Potensial KLB di Unit Pelapor; Webinar Waspada Ancaman Meningitis Meningococcus dan MERS Serta Cegah Cara Penularannya; Pelatihan Penanggulangan TBC Bagi Perawat Di Fasilitas Kesehatan Swasta; Webinar Infeksi Menular Seksual (HIV AIDS) Tantangan Kesehatan Di Era Modern; Webinar Tatalaksana Penemuan Suspect Tuberculosis Dan Tes Cepat Molekuler Serta Pemantauan Pengobatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Webinar Peran Karantina Kesehatan Dalam Cegah Tangkal Penyakit di Pintu Masuk; Pelatihan Penanggulangan TBC Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Webinar Pengawasan Kualitas Tempat Pengelolaan Pangan, Fasilitas Umum Dan Depot Air Minum; Webinar Surveilans DBD dan Deteksi Virus Dengue Pada Nyamuk Aedes SP; dan Pelatihan Dasar Pengendalian Zoonosis dengan Pendekatan One Health.

3. Indikator 3 : Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

a. Pengertian

Nilai indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan resiko lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Mengukur status pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN

1. Range indeks 0-1.

2. Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).
3. Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi skor minimal).
4. Parameter Perhitungan:
 - a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%.
 - b) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 .
 - c) Persentase Bandara/Pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1 .
 - d) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 .
 - e) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 .
 - f) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0.
 - g) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1 .
 - h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan.
 - i) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.
 - j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Cara hitung kinerja:

Nilai Empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurangi nilai minimal).

Rumus:

Capaian realisasi indikator persentase indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara di seluruh wilayah kerja BKK Jayapura pada semester 1 tahun 2025 sebesar 0,66 dari target tahun 2025 sebesar 0,91

$$\frac{\text{Nilai Empiris}}{\text{Nilai Score Maksimal} - \text{Nilai Score Minimal}}$$

Akuntabilitas Kinerja:

Target: 0,91

Realisasi: 1

Capaian Kinerja: 110%

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{0,91} \times 100\% = 110\%$$

Capaian indikator Indeks pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk negara pada tahun 2025 adalah 1 dari target tahun 2025 sebesar 0,91 dengan capaian kinerja 110%. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan beberapa sumber data pada setiap parameter, sumber data berasal dari 2 tim kerja pada BKK antara lain tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan.

Tabel 14. Distribusi Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0.91	1	110
a	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100	100	100
b	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 .	100	100	100
c	Persentase Bandara/Pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1 .	100	100	100
d	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 .	100	80	80
e	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 .	80	100	125
f	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0.	80	100	125
g	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1 .	60	100	167
h	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan.	100	104	104
i	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.	100	115	115

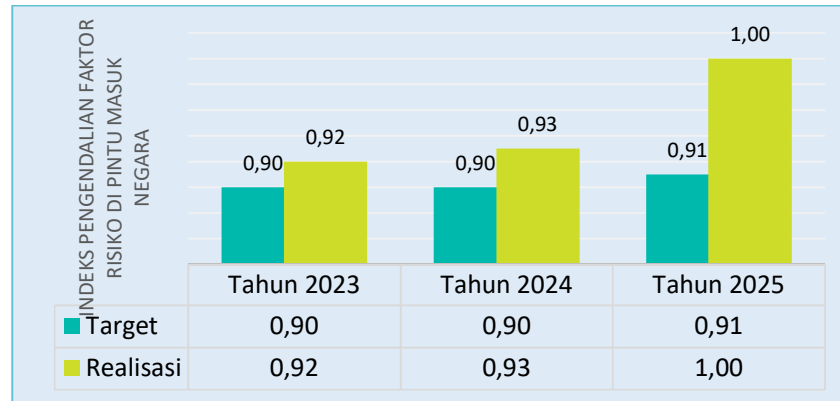
j	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.	100	100	100
---	---	-----	-----	-----

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Semester I 2025

Tabel 15. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d 2025

NO	INDIKATOR	REALISASI			ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,92	0,93	1	Realisasi satker pada tahun 2025 sebesar 1 dari target tahun 2025 sebesar 0.91 dengan capaian kinerja 110%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 yaitu 1 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 0,92, sedangkan tahun 2025 realisasi kinerja 1 juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasi kinerja 0,93. Hal ini tentu dikarenakan realisasi kinerja pada tahun 2025 terdapat poin-poin yang capaiannya maksimal serta mencapai 100%.
a	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%.	50	50	100	
b	Persentase Bandara/ Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 .	100	100	100	
c	Persentase Bandara/Pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1 .	100	100	100	
d	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 .	60	100	80	
e	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 .	100	100	100	
f	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0.	100	100	100	
g	Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1 .	80	60	100	
h	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan.	117	112	104	
i	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.	115	116	115	
j	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.	100	100	100	

Grafik 9. Data Perbandingan Indikator Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023, 2024, dan 2025



Target capaian kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tahun 2025 sebesar 0,91 dengan realisasi sebesar 1 dengan capaian kinerja 110%. Adapun pada tahun 2024 realisasi indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk sebesar 0,93 dari target 0,90 dengan capaian kinerja 103%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk sebesar 0,92 dari target 0,90 dengan capaian kinerja 102%. Jika tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 tentu hasil ini melebihi nilai indeks tahun 2024 dikarenakan tahun 2025 telah banyak tindak lanjut yang langsung dilaksanakan apabila terdapat nilai faktor risiko yang tidak memenuhi syarat.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan capaian realisasi kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk pada tahun 2025 dikarenakan pada tahun tersebut Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 50% namun ditahun ini, nilai tersebut mencapai 100%. Adapun Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI buffer <1 lebih tinggi dari pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 seluruh wilayah kerja memiliki nilai HI buffer <1, maka realisasi ini 100%.

Hal lain yang menjadi faktor paling mempengaruhi realisasi tahun 2025 adalah Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis yang pada bulan Oktober tahun 2025 realisasinya

masih 0% namun pada bulan November periode Triwulan IV capaiannya sudah 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Satker Sejenis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis, membandingkan dengan satker BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak dan BKK Kelas I Ambon. Dipilih BKK tersebut sebagai pembanding karena memiliki tingkatan kelas dan pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara dan PLBN sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi memiliki kecenderungan yang sama.

Capaian kinerja pada BKK Jayapura, BKK Kupang, BKK Pontianak dan BKK Ambon Tahun 2025 untuk indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara seluruhnya mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dan bahkan melebihi target tahun 2025.

Diketahui pula bahwa persentase realisasi tertinggi yaitu pada BKK Jayapura yaitu sebesar 110%, BKK Kupang sebesar 104%, BKK Pontianak sebesar 103% dan BKK Ambon sebesar 102%. Berdasarkan hal ini, maka nilai persentase realisasi terendah dari 4 Satker tersebut adalah BKK Ambon dengan nilai 102%.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0.91	1 (110%)	0.89	0.93 (104%)	0.79	0.81 (103%)	0.93	0.95 (102%)	Realisasi mencapai target pada seluruh satker, dengan realisasi tertinggi BKK Jayapura dan realisasi terendah adalah BKK Ambon.

4) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Analisis perbandingan dengan Target Rencana Jangka Menengah, membandingkan Rencana Jangka Menengah menggunakan target RAK tahun 2022 s/d 2024. Hal ini mengingat belum adanya target RAK tahun 2025 s/d 2029.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH				TAHUN 2025	
	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,86	0,87	0,90	0,91	0,91	1

Perbandingan rencana jangka menengah saat ini masih menggunakan target RAK tahun 2022 – 2025. Berdasarkan tabel diatas, BKK Jayapura untuk realisasi indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2025 sebanyak 1. Jika dibandingkan dengan Target Rencana Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 0,91, maka realisasi satker lebih tinggi dari Target Rencana Jangka Menengah.

Realisasi capaian dapat memenuhi target dikarenakan pada tahun 2025 telah banyak melaksanakan pengendalian secara langsung bila ditemukan faktor risiko. Selain itu, edukasi dan pemberian rekomendasi peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi juga rutin diberikan pada pihak penanggung jawab lokasi pengawasan. Faktor yang sangat mendukung akan tercapainya target tahun 2025 adalah Persentase lokus TTU dan TPM yang memenuhi syarat telah melebihi target dengan masing-masing nilai yaitu TTU 104% dan TPM 115%. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis terealisasi pada bulan November dengan capaian 100%. Hal ini tentu menjadi penambahan capaian kinerja yang sangat signifikan.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator indeks faktor risiko di pintu masuk negara, melalui kegiatan antara lain:

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon < 24 jam dengan Kelengkapan 80%.

Tetap melaksanakan pengawasan serta pemantauan terhadap informasi atau sinyal terkait kasus penyakit dan bencana walaupun untuk target tahunan telah tercapai sebesar 100%.

- 2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1 .

Adalah Jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* yang ditemukan dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa/diidentifikasi pada setiap pintu masuk/wilayah. Realisasi Indeks pinjal ≤ 1 sebesar 100%. Upaya yang dilakukan tetap melaksanakan surveilans kepadatan tikus serta pengamatan keberadaan pinjal secara periodik pada tempat-tempat yang berpotensi diseluruh wilayah kerja.

- 3) Persentase Bandara/Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (<1).

Jumlah kepadatan larva anopheles dihitung berdasarkan jumlah habitat positif larva dibagi dengan total habitat yang dilakukan pengamatan. Realisasi kepadatan larva anopheles sebesar 100% dari target 100%, artinya 100% pintu masuk/wilayah kerja di BKK Jayapura selama tahun 2025 tidak ditemukan habitat positif larva anopheles. Upaya yang dilakukan adalah pengamatan larva anopheles pada habitat perkembangbiakan larva secara rutin dan berkelanjutan serta langsung melakukan pengendalian apabila ditemukan larva anopheles pada habitat yang dilakukan pengamatan.

- 4) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa < 2.

Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap. Realisasi kepadatan kecoa pada tahun 2025 sebesar 80% dari target 100%. Nilai realisasi 80% artinya 4 wilayah kerja memiliki angka kepadatan kecoa rendah sedangkan 1 wilayah kerja memiliki angka kepadatan kecoa tinggi selama tahun 2025. Upaya yang dilakukan adalah tetap melakukan pengamatan dan pemasangan perangkap kecoa pada area-area yang lembab dan gelap yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan kecoa di lokasi TTU dan TPM. Selain itu, dilakukan tindak

lanjut berupa pengendalian secara fisik dengan peningkatan jumlah pemasangan perangkat kecoa serta KIE terhadap pengelola lokasi dengan kepadatan kecoa tinggi.

5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat < 2 .

Indeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan *fly grill*. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Pada tahun 2025 realisasi kepadatan lalat < 2 sebesar 100% dari target 80%. Nilai realisasi 100% artinya 5 dari 5 wilayah kerja yang dinyatakan memenuhi indikator dengan capaian 125%. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengamatan di dalam dan di luar bangunan yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan lalat. Pencegahan melalui saran dan rekomendasi terkait selalu menjaga kebersihan dari area sekitar titik pengukuran kepadatan lalat.

6) Persentase Bandara/Pelabuhan HI Perimeter = 0.

House Indeks (HI) adalah persentase rumah atau bangunan di area perimeter yang positif jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Realisasi HI perimeter = 0 sebesar 100% dari target 80%. Nilai realisasi 100% dari target 80% artinya terdapat 5 dari 5 wilayah kerja yang HI Perimeter = 0 selama tahun 2025 dengan capaian 125%. Upaya yang dilakukan agar seluruh wilayah kerja memenuhi indikator ini adalah tetap rutin melakukan survei jentik *Aedes* daerah perimeter pada rumah/bangunan dan pengendalian dengan cara abatisasi serta edukasi kepada masyarakat untuk melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 3M Plus.

7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1 .

House Indeks (HI) adalah persentase rumah atau bangunan di area buffer yang positif jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Realisasi HI buffer < 1 sebesar 100% dari target 60%. Nilai realisasi 100% artinya terdapat 5 dari 5 wilayah kerja yang angka HI buffer < 1 selama tahun 2025 dengan capaian 167%. Upaya yang dilakukan adalah melakukan survei jentik *Aedes* daerah buffer pada rumah/bangunan dan pengendalian dengan cara abatisasi

serta edukasi kepada masyarakat untuk melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 3M Plus. Bila perlu maka akan dilakukan pengendalian dengan pengasapan (*fogging*) di wilayah yang kepadatan atau nilai HI tinggi.

8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 kali Pemeriksaan.

Persentase lokus Gedung/bangunan perkantoran, dan tempat-tempat umum yang memenuhi nilai standar secara berturut-turut sebanyak minimal 3 kali pemeriksaan yang dipersyaratkan pada Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Realisasi lokus TTU memenuhi syarat sebesar 104% dari target 100%. Upaya yang dilakukan adalah inspeksi kesehatan lingkungan dan pengukuran kualitas lingkungan pada perkantoran, terminal dan tempat ibadah secara rutin dan berkesinambungan.

9) Persentase Lokus TPM Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan.

Persentase Lokus TPM yang memenuhi nilai standar yang dipersyaratkan dalam Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Restoran, Rumah Makan Gol A1, A2, Gerai Pangan Jajanan, dan Depot Air Minum (DAM). Realisasi lokus TPM laik hygiene sebesar 115% dari target 100%. Upaya yang dilakukan adalah inspeksi kesehatan lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan, pemeriksaan sampel air, pemeriksaan sampel makanan secara organoleptik. Selain itu, pemberian rekomendasi hasil inspeksi kesehatan lingkungan tetap dilakukan agar menjadi saran untuk selalu meningkatkan hygiene sanitasi di TPM yang dilaksanakan pengawasan.

10) Persentase Lokus Kualitas Air Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologi/ Bakteriologis.

Persentase lokus pemeriksaan kualitas air memenuhi syarat dengan pemeriksaan kimia lengkap minimal 2 kali dan pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologis 6 kali. Realisasi kualitas air pada lokus yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100% dari target 100%. Upaya yang dilakukan adalah tetap melaksanakan pemeriksaan sampel air bersih dari lokus TPM di perimeter dan buffer kemudian dilanjutkan pengujian kimia lengkap serta bakteriologis/mikrobiologi secara berkala. Apabila ditemukan



sampel air yang tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan intervensi terhadap hasil pemeriksaan. Selain itu kegiatan ini akan terus dilaksanakan agar bisa tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

Gambar 4. Kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara



f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan pelaksanaan indikator ini karena dilakukan pengawasan Kesehatan lingkungan (TPM, TTU dan Kualitas Air) dan Pengamatan pengendalian vektor (Survei Tikus & Pinjal, Survei Jentik/Larva, Survei Nyamuk, Survei Lalat & Kecoa) di seluruh pintu masuk/wilayah kerja BKK Jayapura secara rutin dengan semaksimal mungkin tiap bulan agar selalu ada perbaikan dari bulan ke bulan berikutnya.

Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dan realisasinya melebihi target. Melihat dari realisasi, maka diketahui bahwa terdapat beberapa parameter yang menjadi pendukung hingga capaian melebihi target. Persentase Bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi lalat <2 serta Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dengan capaian masing-masing adalah 125%, hal ini dikarenakan target wilayah kerja dengan nilai dengan indeks populasi lalat <2 dan HI perimeter = 0 yaitu 4 wilayah kerja, namun tercapai sebanyak 5 wilayah kerja. Adapun Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI buffer <1 dengan capaian 167% disebabkan oleh target jumlah wilayah kerja dengan HI buffer <1 yaitu target 3 dari 5 wilayah kerja, namun realisasinya memenuhi syarat di 5 wilayah kerja yang berdampak pada persentase capaian yang melebihi target. Selain itu, Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan dan Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan merupakan parameter pendukung yang capaiannya melebihi 100% dikarenakan jumlah TTU dan TPM yang diperiksa serta memenuhi syarat melebihi jumlah yang ditargetkan.

Hal tersebut didapatkan karena upaya tindak lanjut yang dilaksanakan apabila didapatkan indeks nilai yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, strategi guna mencapai target yang telah ditentukan, dilakukan secara rutin monitoring dan evaluasi untuk menyusun pemecahan masalah serta tindak lanjut terhadap parameter yang tidak memenuhi syarat pada indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

1. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa <2 , dengan tingkat kepadatan tinggi di wilayah kerja Bandara Sentani dikarenakan adanya



lemari kayu yang telah lapuk sebagai tempat perkembang biakan kecoa di warung makan.

2. Perilaku masyarakat di wilayah buffer yang masih sering menampung air bersih menggunakan drum diluar maupun didalam rumah lebih dari 1 minggu sehingga menjadi tempat perkembangbiakan jentik *Aedes sp.*, lantas edukasi yang telah dilakukan masih sulit untuk diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

h. Pemecahan Masalah

1. TPP di wilayah kerja Bandara Sentani yang memiliki tingkat kepadatan kecoa tinggi diberikan edukasi setiap pelaksanaan pengukuran kepadatan, agar dapat melakukan perbaikan dari segi sarana di dapur yang menjadi sumber utama perkembangbiakan kecoa. Selain itu, fokus pengendalian fisik melalui perangkat tetap dilaksanakan pada lokasi tersebut.
2. TPP di wilayah kerja Bandara Sentani yang memiliki tingkat kepadatan kecoa tinggi diberikan edukasi setiap pelaksanaan pengukuran kepadatan, agar dapat melakukan perbaikan dari segi sarana di dapur yang menjadi sumber utama perkembangbiakan kecoa. Selain itu, fokus pengendalian fisik melalui perangkat tetap dilaksanakan pada lokasi tersebut.

i. Analisa Pemanfaatan Sumber Daya

1. Anggaran

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2025 tercapai realisasi 1 dengan capaian kinerja 110% dengan anggaran sebesar Rp120.965.000,-. dari total pagu efektif Rp.121.060.000,- , sehingga terdapat efisiensi 73%. Indikator tercapai efisien karena capaian indikator kinerja kegiatan melebihi target dengan anggaran minimal. Persentase realisasi anggaran 99% sedangkan capaian kinerja indikator ini telah mencapai 110%, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan pada indikator ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan target bulanan yang telah ditentukan. Adapun perhitungannya, sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran kinerja
CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{((121.060.000 \times 110) - 120.965.000)}{(121.060.000 \times 110)} \times 100\% = 0.09$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0.09}{20} \times 50 \right) = 73\%$$

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sesuai standar kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja BKK Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian dan Entomolog Kesehatan. Peningkatan kompetensi teknis yang diikuti untuk mendukung capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara antara lain pelatihan dasar penguatan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit menular potensial kejadian luar biasa (klb) di unit pelapor, webinar pengawasan kualitas tempat pengelolaan pangan, fasilitas umum, dan depot air minum, webinar aspek teknis dalam sertifikat laik sehat (sls) pada tempat fasilitas umum (tfu) berbasis risiko, sosialisasi pengurangan risiko dari kontribusi vektor dalam penyebaran penyakit dbd, webinar nasional fenomena distribusi /klb leptospirosis di Indonesia dan strategi pengendalian, webinar implementasi kampung bebas jentik dalam upaya pengendalian dbd, pelatihan surveilans reservoir penyakit pes dan leptospirosis bagi pengelola program pengendalian vektor di dinas kesehatan dan upt kemenkes, pelatihan dasar pengendalian zoonosis dengan pendekatan *one health* dan sosialisasi pengurangan risiko dari kontribusi vektor dalam penyebaran penyakit dbd, (regional pulau Jawa dan Papua).

4. Indikator 4 : Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Indikator persentase pengelola kinerja dalam pelaporan berbasis daring, sistem monitoring evaluasi kinerja terpadu dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

b. Definisi Operasional

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran BKK diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :

1. Kinerja atas perencanaan anggaran BKK diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK.
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK, diukur menggunakan instrumen indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

Cara perhitungan nilai kinerja anggaran adalah 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA).

c. Rumus / Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja :

Target : 90

Realisasi : 98,23

Capaian Kinerja : 109 %

$$\frac{98,23}{90} \times 100\% = 109\%$$

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah 98,23 sedangkan target nilai kinerja anggaran adalah 90 dengan capaian kinerja sebesar 109%. Indikator nilai kinerja anggaran adalah salah satu indikator yang mencapai target.

Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan data yang bersumber dari sub bagian administrasi umum.

Tabel 18. Distribusi Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai kinerja anggaran	90	98,23	109%

Pada Tabel 18. Dapat dilihat distribusi target dan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025. Realisasi melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh sistem monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan seluruh tim kerja dan sub bagian sebagai penanggung jawab program/kegiatan, perencanaan dan tim keuangan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Target capaian nilai kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 90, realisasi tahun 2025 adalah 98,23 dengan capaian kinerja 109%. Target capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024 sebesar 90, realisasi tahun 2024 adalah 92,43 dengan capaian kinerja 103%. Adapun pada tahun 2023 realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 84,52 dari target 90 dengan capaian kinerja 94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2023, realisasi nilai kinerja anggaran pada tahun 2025 merupakan capaian target tertinggi.

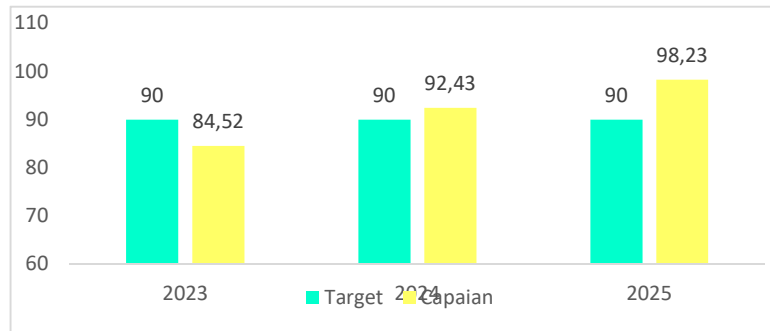
**Table 19. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Jayapura
Tahun 2023 s/d Tahun 2025**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(10)
1	Nilai kinerja anggaran	90	84,52 (94%)	90	92,43 (103%)	90	98,23 (109%)	Indikator Nilai Kinerja Anggaran tidak tercapai di tahun 2023. Namun pada tahun 2025 mencapai target yaitu 109%. Capaian ini merupakan capaian dengan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024

Pada Tabel 19. dapat terlihat bahwa capaian nilai kinerja anggaran Tahun 2025 merupakan capaian dengan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Upaya berbeda yang dilakukan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah adanya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan seluruh tim kerja dan sub bagian sebagai penanggung jawab program/kegiatan, perencana dan tim keuangan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Hal lain yang menyebabkan tercapainya indikator nilai kinerja anggaran adalah adanya revisi DIPA karena *Automatic Adjustment* (AA) yaitu kebijakan pemerintah untuk mencadangkan sementara anggaran yang belum prioritas demi mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global/geopolitik dan menjaga ketahanan fiskal, yang kemudian memicu pemblokiran anggaran di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga perlu disesuaikan anggarannya melalui mekanisme revisi agar kegiatan prioritas tetap berjalan dan anggaran yang tidak mendesak dapat dialihkan atau dibuka blokirnya jika

diperlukan. Seluruh Target Realisasi Volume Rincian Output dapat tercapai meskipun adanya kebijakan *Automatic Adjustment* ini.

Grafik 10. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s/d Tahun 2025



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran BKK Jayapura bernilai sangat baik (98,23) pada tahun 2025 yaitu konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, realisasi anggaran, efisiensi dan capaian keluaran yang telah ditargetkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis, membandingkan dengan satker BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon. BKK Pontianak dan BKK Kupang dipilih sebagai pembanding karena merupakan Balai Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia dengan kelas yang sama yaitu kelas I serta memiliki pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan, bandara dan PLBD. BKK Ambon dipilih sebagai pembanding karena merupakan BKK yang sama kelasnya di Bagian Timur Indonesia sehingga kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi memiliki kecenderungan yang sama.

Capaian indikator nilai kinerja anggaran BKK Pontianak tahun 2025 adalah 99,01; BKK Kupang 97,20 dan BKK Ambon 98,10. Dari ketiga BKK pembanding, capaian indikator nilai kinerja anggaran tertinggi pada tahun 2025

adalah BKK Pontianak, capaian nilai kinerja BKK Jayapura 98,23 lebih tinggi bila dibandingkan dengan BKK Kupang dan BKK Ambon.

Tabel 20. Distribusi perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Pontianak, BKK Kupang, BKK Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai kinerja Anggaran	90	98,23 (109%)	85	99,01 (116%)	85	97,20 (114%)	90	98,10 (109%)	Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dari ketiga BKK perbandingan, BKK Pontianak adalah yang tertinggi, capaian nilai kinerja anggaran BKK Jayapura lebih tinggi bila dibandingkan dengan BKK Kupang dan BKK Ambon

Pada Tabel 20. dapat terlihat bahwa capaian indikator nilai kinerja anggaran Tahun 2025 pada BKK Jayapura tidak berbeda signifikan dengan BKK Ambon. Sedangkan BKK Pontianak memiliki realisasi kinerja tertinggi dari 3 BKK lainnya. Beberapa upaya yang dilakukan agar dapat mencapai target adalah mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan sejalan dengan realisasi anggaran agar nilai Capaian Rincian Output (CRO) tinggi ; melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan menyesuaikan dengan realisasi pada OMSPAN ; menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan RPK dan RPD sehingga realisasi anggaran kegiatan dapat terealisasi dan kinerja dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Rencana Jangka Menengah

Target rencana jangka menengah mengacu pada target Rencana Aksi Kerja (RAK) BKK Kelas I Jayapura tahun 2023 sampai dengan 2025. Target

nilai kinerja anggaran tahun 2025 sama dengan target pada RAK tahun 2025 yaitu 90. Distribusi perbandingan realisasi kinerja dan target rencana jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH			TAHUN 2025	
	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Kinerja Anggaran	90	90	90	90	98,23

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah 98,23. Nilai ini telah melampaui target rencana jangka menengah tahun 2025 yaitu 90. Upaya yang dilakukan agar dapat mencapai target adalah mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan sejalan dengan realisasi anggaran, agar nilai CRO tinggi ; melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan, menyesuaikan dengan realisasi pada OMSPAN ; menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan RPK dan RPD sehingga realisasi anggaran kegiatan dapat terealisasi dan kinerja dapat tercapai.

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Standar Nasional

Target standar nasional mengacu pada target Rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2023 sampai dengan 2025. Target standar nasional nilai kinerja anggaran tahun 2025 (92,3) lebih tinggi dari target realisasi kinerja anggaran satuan kerja (90). Realisasi kinerja anggaran tahun 2025 satuan kerja BKK Jayapura telah melampaui target tahunan dan target standar nasional. Distribusi perbandingan realisasi kinerja anggaran tahun 2025 dan target standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Standar Nasional Tahun 2023 s.d Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET STANDAR NASIONAL			TAHUN 2025	
	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Kinerja Anggaran	93	95	92,35	90	98,23

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah 98,23 (109%) telah melampaui target tahunan yaitu 90 dan target standar nasional yaitu 92,3. Beberapa upaya yang dilakukan agar dapat mencapai target adalah mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan sejalan dengan realisasi anggaran, agar nilai CRO tinggi ; melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan, menyesuaikan dengan realisasi pada OMSPAN ; menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan RPK dan RPD sehingga realisasi anggaran kegiatan dapat terealisasi dan kinerja dapat tercapai.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Target Indikator

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya indikator nilai kinerja anggaran antara lain :

- 1) Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan sejalan dengan realisasi anggaran, agar nilai CRO tinggi.
- 2) Melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan, menyesuaikan dengan realisasi pada OMSPAN.
- 3) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan RPK dan RPD sehingga realisasi anggaran kegiatan dapat terealisasi dan kinerja dapat tercapai.
- 4) Menghitung dan menginput nilai capaian realisasi output keluaran dalam aplikasi SAKTI setiap bulan sebelum tanggal 5.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 dapat mencapai target dipengaruhi oleh nilai perencanaan dan pelaksanaan anggaran, capaian realisasi output, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan tingginya penyerapan anggaran.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Tercapainya target indikator nilai kinerja anggaran bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya yaitu konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan karena terdapat pergeseran realisasi anggaran yang menyebabkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulannya.



h. Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara berkala antara tim kerja sebagai penanggung jawab program/kegiatan, perencana dan tim keuangan dalam proses pelaksanaan anggaran guna memaksimalkan capaian output, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran.
2. Melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif serta memetakan kegiatan - kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan sumber anggaran.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$E = \frac{((11.177.689.000 \times 109) - 11.011.747.916))}{(11.177.689.000 \times 109)} \times 100\% = 0.10$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0.10}{20} \times 50 \right) = 74\%$$

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah 98,23 melampaui target tahun 2025 yaitu 90. Capaian kinerja 109% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.011.747.916,-. dari total pagu Rp. 11.177.689.000,- nilai efisiensi 74% (efisien). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya berupa

ketersediaan anggaran efisien untuk menghasilkan output pada Indikator nilai kinerja anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai indikator nilai kinerja anggaran di wilayah kerja BKK Jayapura. Sumber daya yang berperan adalah semua pegawai yang berada di BKK Jayapura mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, PPPK dan PPPK paruh waktu pada bagian teknis maupun administrasi.

Koordinasi dan kerja sama BKK Jayapura dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura melalui peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh KPPN Jayapura serta kegiatan monitoring dan evaluasi capaian output secara berkala.

5. Indikator 5 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berasal dari nilai *agregat* revisi dipa halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

d. Capaian Indikator**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025****Akuntabilitas Kinerja :**

Target : 93

Realisasi : 97.08

Capaian Kinerja : 104 %

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{97.08}{93} \times 100 \\ &= \mathbf{104\%} \end{aligned}$$

Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan data yang bersumber dari sub bagian adsminitrasi umum.

Tabel 23. Distribusi Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	97.08	104 %

Tahun 2025 Reformulasi penilaian IKPA tidak terdapat perubahan sesuai dengan Per-5/PB/ 2024 dengan beberapa poin-poin sebagai berikut:

- Formulasi penilaian pada 6 (enam) indikator, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM;
- Bobot pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%;
- Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja;
- Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada Indikator Belanja Kontraktual;
- Penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP.

Target kinerja TA 2025 adalah sebesar 93, dan realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar 97.08 dengan pagu anggaran sebesar Rp15.538.558.000,- dan realisasi anggaran sebesar 80.61% atau sebesar Rp12.526.004.281,- dengan capaian indikator kinerja anggaran pada TA 2025 sebesar 104%. Indikator ini merupakan indikator yang mencapai target.

Berikut adalah detail indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran :

- a) Perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA mendapatkan nilai 10 dengan bobot 10 deviasi halaman III DIPA yang sebesar 92.30 dari total bobot sebesar 15 sehingga mendapatkan nilai akhir 13.85, Adapun persentase deviasi halaman III adalah sebagai berikut:

- 1) Pada belanja Pegawai persentase deviasi sebesar 10.88 persen atau sebesar Rp62.373.288,- dari rencana sebesar Rp573.074.837,- dan penyerapan sebesar Rp635.448.125,- Rincian belanja pegawai yang melebihi rencana penarikan dana antara lain: pembayaran gaji dan tunjangan PPPK Tahap 1, gaji dan tunjangan PPPK optimalisasi, dan gaji susulan serta tunjangan 1 (satu) orang pegawai (PNS) penugasan khusus.
- 2) Pada belanja barang persentase deviasi sebesar 19.59 persen atau sebesar Rp26.950.507,- dari rencana sebesar Rp137.569.688,- dan penyerapan sebesar Rp110.619.181,- Rincian belanja pegawai yang tidak terserap antara lain pada kegiatan pemeliharaan fasilitas perkantoran berupa pemeliharaan alat kesehatan/laboratorium dan kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4;
- 3) Belanja modal deviasi yang terjadi sebesar 0% atau sebesar Rp0,- dari rencana belanja sebesar Rp 0,- dan penyerapan belanja sebesar Rp0,-

Kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen. Sampai dengan Desember 2025 kualitas

perencanaan anggaran mendapatkan nilai 95.76 dengan rincian revisi DIPA 100 dan deviasi halaman III DIPA 91.51.

- b) Kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai sebesar 96.14 dengan rincian berikut: Penyerapan anggaran dari total bobot sebesar 20 tercapai sebesar 19.81 atau jumlah nilai akhir 99.04. Belanja kontraktual mendapat nilai 100 dari bobot 10, Pengelolaan UP dan TUP mendapatkan nilai 88.50 dari bobot 10 dan nilai akhir 8.55. Penyelesaian tagihan mendapat nilai 100 dari bobot 10 sehingga nilai akhir adalah 10. Kualitas pelaksanaan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan periode Desember 2025 terdapat 2 (dua) indikator yang nilainya kurang dari bobot yaitu penyerapan anggaran dan pengelolaan UP dan TUP, tetapi pada indikator penyerapan anggaran nilai yang kurang tidak terlalu signifikan karena nilai akhir adalah sebesar 99.04 penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sedangkan pada pengelolaan UP dan TUP nilai yang diperoleh adalah 88.50, nilai ini dibawah bobot. Penyebabnya antara lain karena tambahan uang persediaan (TUP) tidak dipertanggungjawabkan secara maksimal. Hanya sebesar 84.86 persen dari jumlah permintaan tambahan uang persediaan. Hal ini dianggap tidak optimal dalam pengelolaan kas, padahal dana tersebut harusnya tersedia untuk kebutuhan mendesak. Ini menciptakan idle cash (dana mengendap) dan dapat menurunkan kualitas kinerja anggaran secara keseluruhan. Pengelolaan UP/TUP yang buruk (baik itu yang disebabkan karena keterlambatan pertanggungjawaban maupun kelebihan dana) secara langsung menurunkan kinerja anggaran yang diukur melalui IKPA karena dana tidak berputar efisien dan sesuai dengan peruntukan.
- c) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang menghasilkan capaian output sebesar 100 dengan bobot sebesar 25 atau jumlah nilai akhir 100. Capaian output yang tinggi menunjukkan bahwa satker berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Jumlah output BKK Jayapura

adalah sebagai 26 output dengan total nilai capaian rincian output (RO) 3.200 dan nilai capaian rincian output sebesar 100 nilai ketepatan 100 sehingga mendapatkan nilai 100 atau nilai akhir sebesar 25 sesuai bobot 25.

- d) Dispensasi SPM sudah tidak masuk dalam kualitas pelaksanaan anggaran tetapi menjadi pengurang dari total nilai yang didapatkan, dan sampai dengan periode 2025 BKK Kelas I Jayapura tidak ada keterlambatan dalam penyampaian SPM.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, 2024 dan 2025 realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian TA 2025 mendapatkan nilai sebesar 97.08 atau sebesar 104% lebih tinggi dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya, dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 24. Distribusi Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Antara tahun 2023, 2024, dan 2025 BKK Kelas I Jayapura

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	93.95 (101%)	95	92,91 (98%)	93	97,08 (104%)	Tahun 2025 Satker BKK Jayapura mencapai target 97.08 dengan target sebesar 93 atau capaian kinerja 104%. Jika dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, realisasi pada tahun 2025 ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi target pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024. Pencapaian target pada tahun 2025 ini dipengaruhi oleh naiknya nilai kualitas perencanaan anggaran yaitu deviasi halaman III dipa, meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan anggaran yang mana hanya indikator penyerapan anggaran dan pengelolaan UP dan TUP saja yang tidak mencapai bobot. Sedangkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu capaian output yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Serta tidak adanya dispensasi SPM.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Jika dibandingkan dengan satker sejenis yaitu BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon, semua BKK mencapai target. Hal ini berarti terdapat peningkatan dalam kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja dengan ketiga BKK lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Kupang, BKK Kelas I Pontianak, dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	97,08 (104%)	93	97.80 (105 %)	93	99,94 (107 %)	95	97,08 (102%)	Sampai dengan Tahun 2025 semua satker sejenis dengan BKK Kelas I Jayapura semua telah mencapai target.

4) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Tabel 26. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH			TAHUN 2025	
	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	95	93	93	97.08

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKPA bila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2025, realisasi pada 2025 tercapai dengan nilai 97.08. realisasi pada tahun 2025 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tetapi target pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024.

Pencapaian target pada tahun 2025 ini dipengaruhi oleh naiknya nilai kualitas perencanaan anggaran yaitu deviasi halaman III dipa, tetapi pada nilai kualitas pelaksanaan anggaran terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai bobot yaitu penyerapan anggaran saja yang tidak mencapai bobot dan pengelolaan UP/TUP. Sedangkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu capaian output nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tidak adanya dispensasi SPM.

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 27. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Kemenkes Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA KEMENKES TA 2025	TARGET TA 2025	REALISASI TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93	97.08

Target Renstra Kemenkes tahun 2025-2029 untuk indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yaitu 93, dan target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada BKK Kelas I Jayapura yaitu 93 sama dengan target pada Renstra Kemenkes.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan reviu DIPA minimal per triwulan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran khususnya pada belanja barang operasional perkantoran.
3. Melakukan pengisian data capaian output secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period.

4. Menyusun kembali rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada halaman III DIPA secara akurat sesuai rencana kegiatan, khusus untuk belanja barang pada kegiatan operasional perkantoran agar meningkatkan koordinasi antara bendahara pengeluaran dan tim perencanaan.
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tim keuangan secara berkala (mingguan).
6. Melaksanakan rapat mingguan untuk melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mencapai kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

f. Analisa Penyebab Kegagalan

Selain karena terdapat 2 (dua) indikator yang mempengaruhi penyebab kegagalan dalam pencapaian nilai kinerja indikator pelaksanaan anggaran, yaitu deviasi halaman III DIPA yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan Pengelolaan UP dan TUP. Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain deviasi disebabkan karena penyerapan belanja tidak memenuhi target RPK/RPD yang telah direncanakan sehingga deviasi pada jenis belanja melebihi 5% dari batas maksimal rata-rata deviasi bulanan.

Pengelolaan UP/TUP yang juga tidak menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan selain disebabkan karena keterlambatan pertanggungjawaban juga disebabkan karena kelebihan dana yang dimiliki oleh bendahara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Hal ini secara langsung menurunkan kinerja anggaran yang diukur melalui IKPA karena dana tidak berputar efisien dan sesuai dengan peruntukannya.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi sehingga terdapat indikator yang tidak mencapai bobot nilai disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan sehingga pada saat pelaksanaan anggaran seringkali tidak sesuai antara rencana penarikan dana dan pertanggungjawaban keuangan. Kurangnya rasa tanggungjawab dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan anggaran sehingga pada saat pengajuan SPM *revolving* UP/TUP sering kali tertolak karena pada saat pengajuan SPM diblokir oleh KPPN sehingga pengajuan UP/TUP mengalami keterlambatan.



Selain itu kurangnya pemahaman tentang pengelolaan uang persediaan sehingga pertanggungjawaban uang persediaan masih sering dianggap jika uang persediaan atau tambahan uang persediaan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 50% sudah memenuhi syarat pertanggungjawaban, tetapi tidak diperhatikan lagi bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja anggaran.

h. Pemecahan Masalah

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan khususnya pada deviasi halaman III DIPA:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran khususnya pada RPD. Penyusunan RPD dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sebenarnya, bukan hanya mengacu pada target penyerapan.
- 2) Melaksanakan monitoring bulanan terkait pelaksanaan RPD halaman III DIPA secara rutin.
- 3) Memanfaatkan periode pemutakhiran RPD (maksimal 10 hari kerja tiap awal triwulan) untuk menyesuaikan RPD jika ada perubahan signifikan.
- 4) Mengajukan revisi DIPA sesegera mungkin jika terjadi perubahan yang akan mempengaruhi rencana penarikan dana.
- 5) Mengusahakan rata-rata deviasi bulanan tidak melebihi 5% untuk setiap jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal).

Sedangkan dalam pengelolaan UP dan TUP dibutuhkan strategi sebagai berikut:

- 1) Memonitoring setiap hari deadline *revolving* GUP melalui OMSPAN dan mengingatkan bendahara terkait deadline tersebut minimal 1 minggu sebelum jatuh tempo untuk mengantisipasi adanya penolakan SPM/kendala teknis aplikasi pada hari terakhir
- 2) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tim keuangan secara berkala (mingguan).
- 3) Melakukan perencanaan dan penghitungan permintaan Uang Persediaan (UP) rutin maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara maksimal dengan berkoordinasi bersama seluruh pengelola keuangan sehingga pada saat pertanggungjawaban, Uang Persediaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan 100%.



- 4) Sebelum mengajukan SPM *revolving* GUP, Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan secara mandiri atas sub komponen persentase GUP disebulankan sesuai ketentuan perhitungan yang ditetapkan.
- 5) Bendahara Pengeluaran memanfaatkan proporsi UP KKP yang telah diberikan dengan menggunakan KKP secara aktif dalam pelaksanaan transaksi belanja sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan;
- 6) Bendahara menyusun rincian kebutuhan penggunaan TUP secara akurat dengan memastikan besaran nominal TUP yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya tanpa ada yang perlu disetor kembali ke kas negara.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(142.289.000 \times 104 - 142.227.065)}{(142.289.000 \times 104)} \times 100\%$$

$$E = 3.9 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{3.9}{20}\right) \times 50$$

$$NE = 60\%$$

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 97,04 dari target 93 dengan capaian kinerja 104%. Realisasi anggaran indikator sebesar Rp140.202.065,- dari total pagu Rp330.046.000,- sehingga nilai efisiensi adalah sebesar 60%.

Nilai efisiensi yang besar disebabkan pagu indikator menggunakan pagu sebelum efisiensi.

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara maksimal dalam rangka mencapai target persentase nilai kinerja anggaran adalah semua sumber daya yang ada di BKK Kelas I Jayapura. Sumber daya yang berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah analis pengelola keuangan APBN, pranata keuangan APBN, perencana dan seluruh tim kerja di BKK Kelas I Jayapura. Sumber daya terkait telah melakukan pelatihan dan webinar seperti Sosialisasi *Core Tax* bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan; Sosialisasi Open Class (AP Corner) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025; Diklat Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Core Tax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan”; Webinar Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencanaan Dan Kompetensi Jabatan Fungsional, E-Learning Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang, Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan V Tahun 2025, E-Learning Pengantar PIPK (Open Access) Tahun 2025, E-Learning Pengantar Analisis Laporan Keuangan Dalam Penilaian Tahun 2025.

6. Indikator 6 : Kinerja Implementasi WBK Satker

a. Pengertian

Indikator untuk mengukur perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assessment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assessment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Cara perhitungan nilai indikator kinerja implementasi WBK Satker yaitu akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil.

d. Capaian Indikator**1) Perbandingan Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2025**

Penilaian implementasi kinerja WBK satker Tahun 2025 adalah 87.08 yang diperoleh berdasarkan hasil desk reviu nilai kinerja implementasi WBK Satker Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan tanggal 23 Desember 2025. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan sumber data yang berasal dari tim kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.

Tabel 28. Distribusi Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	PROYEKSI TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Implementasi kinerja WBK satker	75	87,08	82%

2) Perbandingan Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2023 s.d Tahun 2025

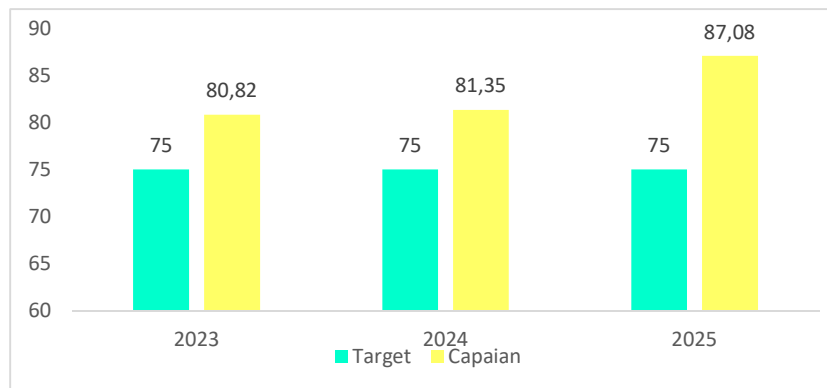
Penilaian implementasi kinerja WBK satker Tahun 2025 adalah 87.08. Pada tahun 2023 BKK Jayapura memperoleh nilai 80,82. Pada tahun 2024

memperoleh nilai 81,35 Distribusi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Tahun 2023 s.d Tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Implementasi kinerja WBK satker	75	80,82 (108%)	75	81,35 (108%)	75	87,08 (116%)

Grafik 11. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker tahun 2023 s.d tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura



Pada Tabel 29 dan Grafik 11 terlihat bahwa capaian indikator implementasi kinerja WBK Satker tahun 2025 merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan dari Kepala BKK Jayapura untuk membentuk kelompok kerja dan menentukan komponen-komponen pembangunan zona integritas yang akan dibangun. Kelompok kerja ini terdiri dari 6 (enam) kelompok kerja yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Capaian indikator implementasi kinerja WBK Satker tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan capaian pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan dari Kepala BKK

Jayapura untuk membentuk kelompok kerja dan menentukan komponen-komponen pembangunan zona integritas yang akan dibangun. Kelompok kerja ini terdiri dari 6 (enam) kelompok kerja yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

3) Perbandingan Implementasi Kinerja WBK Satker BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Implementasi kinerja WBK satker jika dibandingkan dengan satker sejenis yaitu BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon maka diperoleh perbandingan sebagai berikut:

Tabel 30. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Antara BKK Kelas I Jayapura dan BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Implementasi Kinerja WBK Satker	75	87,08 (116%)	75	84.33 (112%)	75	87.06 (116%)	80	93,69 (100%)	Implementasi kinerja WBK satker dibandingkan dengan 3 BKK lainnya, BKK Jayapura mampu mencapai target yang ditetapkan sama seperti 3 BKK lainnya sama seperti 3 BKK lainnya

Pada Tabel 30 Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Antara BKK Kelas I Jayapura, BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025 terlihat bahwa BKK Jayapura mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Target ini dapat dilampaui setelah adanya penetapan Surat Keputusan Kepala BKK Jayapura terkait Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di BKK Jayapura Tahun 2025, secara berkala setiap

kelompok kerja (Pokja) melakukan monitoring dan evaluasi program kerja dan tindak lanjut pembangunan zona integritas.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah.

Tabel 31. Distribusi perbandingan realisasi kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH			TAHUN 2025	
	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Implementasi Kinerja WBK Satker	75	75	75	75	81,35

Perbandingan target dengan rencana jangka menengah masih menggunakan RAK revisi tahun 2022 – 2024. Berdasarkan perbandingan target dengan rencana jangka menengah realisasi I tahun 2025 melampaui target yaitu 81,35. Penetapan target sebesar 75 pada RAK dikarenakan BKK Kelas I Jayapura belum diusulkan menjadi salah satu satker yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

5) Perbandingan Realisasi Indikator Implementasi Kinerja WBK Satker Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan target dengan standar nasional menggunakan Renstra Kemenkes tahun 2025 - 2029. Berdasarkan perbandingan target dengan standar nasional sebesar 75, nilai capaian indikator ini sebesar 81,35 sehingga capaian melebihi target standar nasional. Penetapan target sebesar 75 dikarenakan BKK Kelas I Jayapura belum diusulkan menjadi salah satu satker yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 32. Distribusi perbandingan realisasi kinerja dengan Target Nasional BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TAHUN 2025	
	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI
(1)		(5)	(6)
Implementasi Kinerja WBK Satker	75	75	81,35

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah dengan membentuk kelompok kerja dan menentukan target prioritas yang akan dibangun, antara lain : menyusun budaya kerja BKK Jayapura; pertemuan secara berkala untuk pegawai yang diusulkan sebagai agen perubahan untuk membahas rencana proyek inisiatif yang akan dilakukan; menindaklanjuti rekomendasi hasil survei Persepsi Korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik semester 2 Tahun 2025; menyusun sistem pemberian kompensasi bagi pengguna jasa jika layanan publik tidak sesuai dengan standar layanan.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi target prioritas yang telah ditentukan, berikut penyebab keberhasilan pencapaian target indikator implementasi kinerja WBK BKK Jayapura : budaya kerja BKK Jayapura telah disusun, disosialisasikan secara internal dan eksternal; Agen perubahan BKK Jayapura telah diusulkan dan menyusun rencana proyek inisiatif yang akan dilakukan; dilakukan monitoring dan evaluasi atas proyek inisiatif agen perubahan, menindaklanjuti rekomendasi hasil survei Persepsi Korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik semester 2 Tahun 2025 yaitu penambahan konten visual dan interaktif tentang antikorupsi, penempatan media di area publik yang strategis, integrasi kampanye antikorupsi dalam setiap layanan atau kegiatan, meningkatkan kecepatan dan transparansi proses tindak lanjut pengaduan, menyediakan informasi progres tindak lanjut secara terbuka kepada pelapor, mendorong publik untuk aktif menggunakan kanal pengaduan yang telah disediakan

Pada tahun 2024 berdasarkan Surat Nomor PS.08.02/C/352/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penugasan Pendampingan Penguatan ZI WBK UPT Bidang

Kekarantinaan Kesehatan telah ditetapkan Balai Besar Keekarantinaan (BBKK) Denpasar sebagai pendamping Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pada tanggal 4 juni 2024 berdasarkan surat nomor PS.08.02/C.X.19/1610/2024 BKK Kelas I Jayapura telah berkoordinasi dengan BBKK Denpasar untuk dilakukan pendampingan dalam melakukan penilaian mandiri dan telah ditindaklanjuti dengan rencana pendampingan pada bulan Juli 2024 namun hingga akhir tahun 2025 belum dapat direalisasikan sehubungan dengan persiapan BBKK Denpasar memperoleh predikat Menuju WBK Nasional.

Diharapkan tahun 2026 pendampingan yang direncanakan dapat diimplementasikan agar BKK Kelas I Jayapura lebih baik dalam penyajian dokumen implementasi WBK dan dapat diusulkan menjadi salah satu satker yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi adalah masih terdapat kelompok kerja yang belum melengkapi data dukung yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga mempermudah dalam penilaian mandiri dan belum optimalnya upaya merubah pola pikir pegawai ke arah yang lebih baik dengan menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui keterlibatan agen perubahan.

h. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : 1) Setiap pokja secara berkala mengevaluasi kelengkapan dokumen data dukung sesuai LKE implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; 2) dilakukan pendampingan untuk membantu Pokja dalam mencapai nilai pengungkit serta berkomitmen menjalankan sistem manajemen yang dibangun dan sebelum pelaksanaan desk review WBK/WBBM seluruh kelompok kerja memahami poin-poin penilaian sehingga dapat mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan; 3) mengoptimalkan upaya merubah pola pikir pegawai ke arah yang lebih baik dengan menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui keterlibatan agen perubahan yaitu dengan menetapkan agen perubahan dalam Surat Keputusan Kepala BKK Jayapura.



i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Target indikator Kinerja implementasi WBK satker adalah 75 dengan realisasi 87.08 dan persentase capaian kinerja 116%. Anggaran tersedia guna mendukung pencapaian target Indikator kinerja implementasi WBK/WBBM Rp.203.959.000,- dengan realisasi Rp 115.000,-. Persentase realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif. Kebijakan penghematan anggaran, terdapat nilai blokir sebesar Rp. 203.844.000. Nilai efisiensi 84%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya berupa ketersediaan anggaran efisien untuk menghasilkan output kegiatan implementasi WBK satuan kerja.

2. Sumber Daya Manusia

Seluruh Pegawai BKK Kelas I Jayapura baik dari kantor induk maupun dari wilayah kerja dilibatkan dalam kelompok kerja dan upaya mencapai predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk mendukung kompetensi SDM dalam pencapaian indikator implementasi Kinerja WBK Satker, pegawai BKK Jayapura mengikuti Sharing session Strategi Menuju WBK Nasional, Workshop Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Webinar Penerapan WBS (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Kemenkes, Micro Learning Anti Korupsi, E learning Program Pengendalian Gratifikasi.

7. Indikator 7 : Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya

a. Pengertian

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

c. Rumus / Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$$

$$\frac{65}{66} \times 100\% = 98\%$$

Realisasi indikator persentase ASN (PNS dan PPPK) yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2025 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura sebesar 98% atau berkontribusi sebanyak 65 orang ASN dari target 95% pada tahun 2025 dari seluruh jumlah ASN yang terdiri dari 42 orang PNS, 16 orang PPPK, 4 orang CPNS dan 4 orang PPPK paruh waktu. Indikator ini merupakan indikator yang mencapai target.

d. Capaian Indikator**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025****Akuntabilitas Kinerja :**

Target : 95%

Realisasi : 98%

Capaian Kinerja : 103%

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\frac{98\%}{95\%} \times 100\% = 103\%$$

Capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dari target 95%, dapat terealisasi 98% dengan capaian kinerja 103% tahun 2025. Nilai realisasi pada indikator ini merupakan indikator yang mencapai target tahun 2025. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan data yang bersumber dari sub bagian administrasi umum.

Tabel 33. Distribusi Capaian Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	98%	103%

Sebanyak 65 orang ASN di BKK Jayapura berkontribusi meningkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL sampai Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2025 yaitu 103% atau 65 orang ASN yang meningkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL melebihi target pada tahun 2025 dikarenakan sebagian besar ASN mengikuti peningkatan kompetensi secara gratis dan dapat mengakses mandiri melalui *Learning Management System* (LMS) atau platform pembelajaran kesehatan digital yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. LMS Kemkes juga dikenal dengan nama Plataran Sehat.

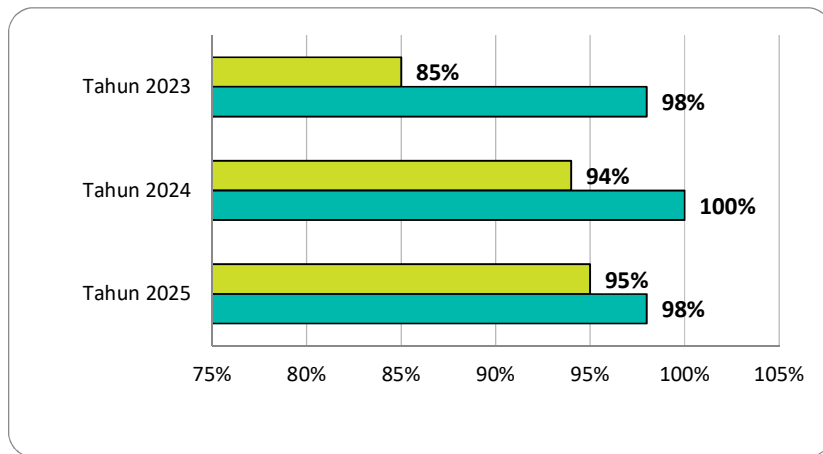
2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2025 sebesar 71%, realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 141%. Tahun 2023 realisasi persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 98% dari target 85% dengan capaian kinerja 115% sedangkan pada tahun 2024 realisasi persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 100% dari target 94% dengan capaian kinerja 106%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 realisasi indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang diharapkan dalam satu tahun. Ketercapaian tahun 2025 sedikit menurun daripada tahun sebelumnya, namun masih tetap memenuhi target yang telah ditentukan

Tabel 34. Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL Balai Kekarantinaan Kelas I Jayapura Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	85%	98% (115%)	94%	100% (106%)	95%	98% (103%)	Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 103% telah mencapai target, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024

Grafik 12. Distribusi Perbandingan Capaian Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d 2025



3) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Analisis perbandingan dengan satker sejenis, membandingkan dengan satker BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Ambon. Ketiga Balai Kekarantinaan Kesehatan tersebut dijadikan sebagai pembanding karena merupakan BKK Kelas I yang ada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, memiliki jenis pintu masuk yang sama yaitu pelabuhan,

bandara dan PLBN (BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang) dan BKK bagian Indonesia timur (BKK Ambon) sehingga kompleksitas masalah SDM yang dihadapi memiliki kecenderungan yang sama.

Berdasarkan indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, BKK Kelas I Ambon menunjukkan kinerja terbaik dengan realisasi 100%. BKK Kelas I Kupang dan BKK Kelas I Pontianak berhasil melampaui target dengan realisasi masing-masing 93,40% dan 93,1%, sedangkan BKK Kelas I Jayapura tahun 2025 memiliki nilai realisasi 98%. Berdasarkan capaian kinerja, BKK Kelas I Ambon menunjukkan kinerja terbaik dengan capaian kinerja sebesar 118%, BKK Kelas I Pontianak memiliki capaian kinerja sebesar 116%, BKK Kelas I Kupang memiliki capaian kinerja sebesar 114%, sedangkan BKK Kelas I Jayapura memiliki capaian kinerja sebesar 103%. Distribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 35. Distribusi Perbandingan Capaian Kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Kupang, dan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	BKK KELAS I JAYAPURA		BKK KELAS I KUPANG		BKK KELAS I PONTIANAK		BKK KELAS I AMBON	
		T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	95%	98% (103%)	82%	93,40% (114%)	80%	93,1% (116%)	85%	100% (118%)

4) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Tabel 36. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA JANGKA MENENGAH			TAHUN 2025	
	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82%	94%	82%	80%	71%

Perbandingan rencana jangka menengah masih menggunakan target pada RAK tahun 2022 – 2025 yang telah disusun tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas realisasi indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2025 telah melampaui target yaitu 95% dengan realisasi sebesar 98%.

5) Perbandingan Realisasi Indikator dan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Kemenkes Tahun 2025

Tabel 37. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	REALISASI TAHUN 2025
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	4.280 orang	98% (65 orang)

Target indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya pada Renstra Kemenkes yaitu 4.280 orang. Realisasi di BKK Kelas I Jayapura menunjukkan realisasi 98%, dengan 65 orang ASN yang telah berkontribusi dalam peningkatan kapasitasnya. Setiap ASN tersebut telah mengikuti pelatihan dengan total 20 Jam Pelatihan (JPL) dalam periode 1 tahun.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Dalam mencapai target indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya terdapat upaya yang dilakukan yaitu mengikuti berbagai jenis pelatihan dan peningkatan kompetensi, baik di tingkat nasional maupun tingkat instansi. Pelatihan ini dilaksanakan baik secara luring (tatap muka) maupun daring (online). Biaya pelatihan ini dibiayai melalui anggaran DIPA BKK Kelas I Jayapura, yang mencakup berbagai jenis pelatihan yang diikuti oleh ASN sesuai dengan prioritas pengembangan kompetensinya. Selain itu, ASN juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pembina atau instansi di wilayah, baik melalui undangan resmi maupun secara mandiri. Beberapa pelatihan juga dapat diikuti secara gratis, yang memungkinkan

ASN untuk memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Beberapa jenis pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi Core Tax bagi Instansi Pemerintah : Pembuatan Bukti Potong Pembayaran dan Pelaporan pada tanggal 05 Februari 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
2. Diklat Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) "Core Tax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan" pada tanggal 05 Februari 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
3. E-learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Fungsional Penyelia Angkatan II pada tanggal 15 Februari 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
4. Webinar Ekonomi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan : Peluang dan Tantangan pada tanggal 17 Februari 2025 oleh Universitas Padjadjaran
5. Webinar Eksklusif "Sehat Untuk Semua: Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan Aplikasi Satu Sehat Mobile" pada tanggal 19 Februari 2025 oleh Ikatan Pranata Humas Indonesia
6. Workshop Kelas Menulis Mediakom Februari 2025 "Cara Mudah Menulis Press Release" Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 21 Februari 2025 oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes
7. E-Learning Pengenalan Kebijakan Publik Angkatan II Tahun 2025 pada tanggal 21 Februari s.d 20 Maret 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
8. Kursus Exploring AI and its Impacts pada tanggal 22 Februari 2025 oleh iTrain - P2KASN Kemenkes
9. E-Learning MOOC Advokasi Bidang Kesehatan Pengembangan Kompetensi ASN pada tanggal 24 Februari s.d 31 Maret 2025 oleh Pusat Pengembangan Kompetensi
10. Webinar Peran Karantina Kesehatan dalam Cegah Tangkal Penyakit di Pintu Masuk pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



11. Webinar NGOPI ASN (Ngobrol Pintar ASN) Kemenkes Seri 3 Membuat Desain Program Pengembangan Kompetensi pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes
12. Sosialisasi Open Class (AP Corner) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
13. Webinar Peran Karantina Kesehatan dalam cegah tangkal penyakit di Pintu Masuk pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Dit Surkarkes
14. Pelatihan Manajerial Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencana dan Kompetensi Jabatan Fungsional pada tanggal 03 Maret 2025 oleh P2KASN Kemenkes
15. Webinar Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencanaan dan Kompetensi Jabatan Fungsional pada tanggal 04 Maret 2025 oleh Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes
16. E-Learning Pengamanan dan Pemeliharaan BMN pada tanggal 10 Maret 2025 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
17. E-Learning Pengantar Analisis Laporan Keuangan Dalam Penilaian pada tanggal 11 Maret 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
18. Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
19. Webinar Sharing session Strategi Menuju WBK Nasional pada tanggal 14 Maret 2025 oleh BKK Kelas I Palembang
20. Pelatihan Teknis "Pelatihan Penanggulangan TBC bagi Perawat di Faskes Swasta pada tanggal 15 Maret s.d 31 Juli 2025 oleh Dit Pengembangan Mutu
21. E-learning Pendekatan Biaya dalam penilaian pada tanggal 17 Maret s.d 21 Desember 2025 oleh Pusdiklat Anggaran
22. Pelatihan Teknis Evaluasi Workshop Implementasi SAKIP Tahun 2024 oleh SPI/SKI pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemenkes



23. Diklat Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan II Tahun 2025 pada tanggal 18 Maret s.d 24 Maret 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
24. Pelatihan Manajerial Penetapan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Bapelkes Cikarang
25. Sosialisasi Open Class (AP Corber) Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan.
26. Intensive Speaking Class pada tanggal 11 Agustus s.d 22 September 2025 oleh lembaga pendidikan BEYOND EDUCATION CENTRE, pelatihan ini menggunakan DIPA BKK Kelas I Jayapura dan diikuti oleh pegawai BKK Jayapura sebanyak 30 orang.
27. Webinar Nasional Fenomena Distribusi/KLB Leptospirosis di Indonesia dan Strategi Pengendalian pada 4 November 2025 oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan
28. E-Learning Pengantar Analisis Laporan Keuangan Dalam Penilaian Tahun 2025 pada 18 Desember 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
29. Webinar Nasional-AI-Powered Scientific Writing for Health Professionals : Menju Jurnal Bereputasi Sinta & Scopus Angkatan 1 pada 20 Desember 2025 oleh Kolegium Epidemiologi Kesehatan
30. Webinar Pengawasan Kualitas Air Minum pada 29 Desember 2025 oleh Indonesia Husada Mandiri

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya mencapai target sebesar 103%, karena melakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaiannya antara lain dengan melakukan pengumpulan data setiap bulan terhadap ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi. Hasil pengumpulan data dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan guna mengidentifikasi ASN yang belum mengikuti peningkatan kompetensi atau yang telah mengikuti peningkatan

kompetensi namun belum mencukupi 20 JPL. Selain melakukan pengumpulan data setiap bulannya, terdapat upaya internal dari masing-masing ASN yaitu mencari informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi secara mandiri melalui LMS yaitu *platform* pembelajaran kesehatan digital yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan mengikuti melalui instansi penyelenggara pelatihan seperti Balai Pelatihan Kesehatan.

Salah satu tema perubahan budaya kerja yaitu eksekusi efektif dalam ritual pengembangan kompetensi wajib dilakukan setiap individu dalam Kemenkes. Pengembangan kompetensi adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung transformasi. Pegawai BKK Kelas I Jayapura telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengikuti program ini dengan aktif mencari pelatihan melalui *Learning Management System* Kemenkes, informasi pelatihan atau diklat dari berbagai sumber pembelajaran lainnya.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah kurangnya proaktif beberapa ASN dalam mencari informasi mengenai pelatihan, diklat, seminar atau webinar yang relevan. Sebagian ASN masih bergantung pada informasi yang diberikan secara langsung, sehingga tidak semua kesempatan pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan, karena peningkatan kompetensi ASN sangat bergantung pada partisipasi aktif ASN. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan akses informasi, serta memberikan dorongan kepada ASN untuk lebih proaktif dalam mengikuti program-program peningkatan kapasitas tersebut.

h. Pemecahan Masalah

Melakukan dan memberikan motivasi dan bimbingan terhadap ASN sehingga dapat mengupdate informasi tentang peningkatan kompetensi. Menyebarkan informasi mengenai jadwal pelatihan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, grup WhatsApp, atau media sosial dan diharapkan ASN dapat lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensinya dan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.



i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya selama tahun 2025 terealisasi 98% dari target 95% dengan capaian kinerja 103% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.550.00,- dari total pagu sebesar Rp. 57.995.00,- sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 59 (efisien). Indikator tercapai efisien karena capaian indikator kinerja kegiatan melebihi target dengan anggaran minimal, hal ini mengindikasikan efektivitas program dimana didukung beberapa faktor antara lain pemanfaatan teknologi informasi dengan adanya pelatihan atau seminar yang dilakukan secara daring dan tidak membutuhkan anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dalam mencapai indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura. Sumber daya yang berperan adalah semua pegawai yang berada di BKK Kelas I Jayapura mulai dari Kepala Balai, Ka.Sub Bag Adum, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, dan PPPK turut berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi.

8. Indikator 8 : Persentase Realisasi Anggaran

a. Pengertian

Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

b. Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%.

$$\frac{\text{REALISASI ANGGARAN (RP)}}{\text{PAGU ANGGARAN}} \times 100\%$$

d. Capaian Indikator**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025****Akuntabilitas Kinerja :**

Target : 96 %

Realisasi : 80,61 %

Capaian Kinerja : 83,97%

$$R = \frac{80.61\%}{96\%} \times 100$$

$$= 83.97\%$$

Pengukuran kinerja indikator Persentase Realisasi Anggaran diambil dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu RI, sebagaimana dalam *screenshot* gambar dibawah ini:

Gambar 5. Screenshot Realisasi Anggaran Om Span

FILTER: PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER CARI DI HALAMAN...												
NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA								TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v	^ v
1	416032 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA	PAGU	7,727,448,000	6,942,995,000	868,115,000	0	0	0	0	0	0	15,538,558,000
		REALISASI	7,567,395,106	4,438,123,675	520,485,500	0	0	0	0	0	0	12,526,004,281
			(97.93%)	(63.92%)	(59.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(80.61%)
		SISA	160,052,894	2,504,871,325	347,629,500	0	0	0	0	0	0	3,012,553,719
GRAND TOTAL		PAGU	7,727,448,000	6,942,995,000	868,115,000	0	0	0	0	0	0	15,538,558,000
		REALISASI	7,567,395,106	4,438,123,675	520,485,500	0	0	0	0	0	0	12,526,004,281
			(97.93%)	(63.92%)	(59.96%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(80.61%)
		SISA	160,052,894	2,504,871,325	347,629,500	0	0	0	0	0	0	3,012,553,719

Capaian indikator nilai persentase realisasi anggaran Tahun 2025 dari target 96% tercapai sebesar 80.61% berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp15.538.558.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp12.526.004.281,- dan merupakan salah satu indikator yang tidak tercapai.

Tetapi jika dibandingkan dengan ketersediaan dana (pagu efektif) pada aplikasi sakti sebesar Rp12.702.394.000,- persentase realisasi anggaran BKK

Kelas I Jayapura pada tahun 2025 sebesar Rp12.526.374.331,- atau mencapai 98.61% dan dapat menjadi indikator yang tercapai dengan total capaian kinerja sebesar 103%.

Selisih antara pagu anggaran dan ketersediaan dana pada aplikasi sakti disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran yang efisiensi yaitu sebesar Rp2.836.164.000,-. Untuk memenuhi target pada indikator ini, diperlukan data yang bersumber dari sub bagian administrasi umum.

Tabel 38. Distribusi Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2025				
		TARGET	Om Span		Pagu Ketersediaan Dana	
			Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Realisasi Anggaran	96%	80.61 %	84 %	98.61 %	103 %

Beberapa hal dilakukan untuk mencapai target realisasi antara lain:

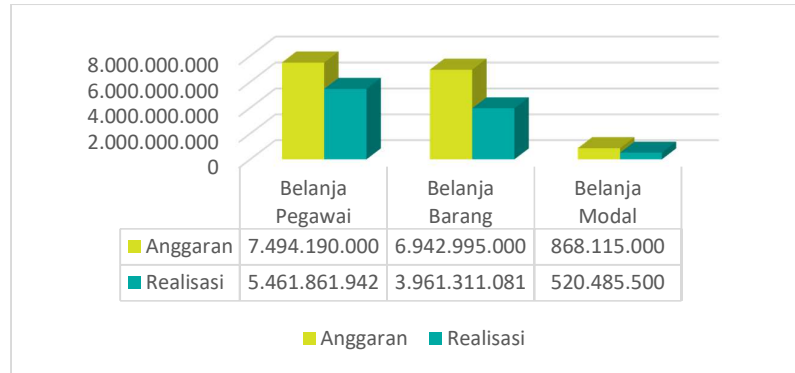
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memfokuskan pada menyusun kembali rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada halaman III DIPA secara akurat sesuai rencana kegiatan.
2. Melakukan reviu DIPA secara berkala untuk menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.
4. Mempercepat proses penyelesaian tagihan (tepat waktu dan tidak terlambat).
5. Melakukan monitoring dan evaluasi tim keuangan secara berkala (mingguan).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Tabel 39. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Realisasi Anggaran	95	95.45% (100%)	96	98.24% (102%)	96	80,61% (84%)	Jika dibandingkan realisasi TA 2023, 2024 realisasi tahun 2025 lebih rendah disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang mana terdapat kegiatan yang diblokir anggarannya sehingga tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Grafik 13. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025



Berdasarkan tabel distribusi perbandingan capaian persentase realisasi anggaran BKK Kelas I Jayapura dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2023 target realisasi anggaran meningkat dari 95% menjadi 96% di tahun 2024 dan tahun 2025. Pada tahun 2024 realisasi anggaran masih dapat mencapai target realisasi walaupun di tahun 2024 juga terjadi efisiensi anggaran, tetapi efisiensi anggaran yang terjadi di tahun 2024 dilaksanakan di bulan November 2024 berfokus pada efisiensi belanja perjalanan dinas sebagai wujud penghematan sisa pagu anggaran sehingga tidak terlalu berpengaruh pada realisasi BKK Kelas I Jayapura. Sedangkan Efisiensi anggaran tahun 2025 di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menginstruksikan untuk melakukan pemotongan belanja khusus untuk BKK Kelas I Jayapura sebesar Rp2.836.164.000,- dari pagu awal sebesar Rp.15.305.300.000,-

Selain itu salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah pada bulan Oktober 2025 terdapat penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp233.258.000,- yang dialokasikan untuk gaji PPPK sehingga DIPA BKK Kelas I Jayapura bertambah sebesar Rp15.538.558.000,- yang rencananya tambahan pagu anggaran ini akan diberikan kepada 23 orang PPPK Optimalisasi yang lulus tetapi hanya terserap untuk 6 (enam) orang PPPK optimalisasi (sisanya sebanyak 17 orang mengundurkan diri).

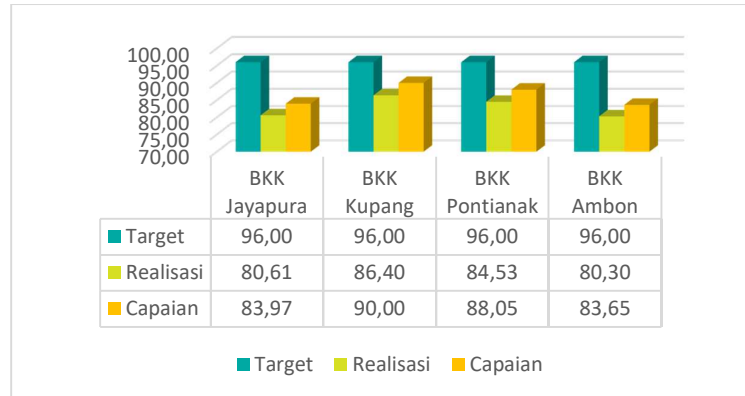
3) Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

Capaian kinerja BKK Pontianak Tahun 2025 untuk indikator persentase realisasi anggaran adalah sebesar 88.05, BKK Kupang sebesar 90, BKK Kelas I Jayapura sebesar 83.97 dan BKK Ambon sebesar 83.65. Keempat BKK yang menjadi perbandingan capaian indikator persentase anggaran sampai dengan Tahun 2025 semua tidak mencapai target baik itu secara realisasi anggaran maupun berdasarkan capaian kinerja

Tabel 40. Distribusi perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura dengan BKK Pontianak, BKK Kupang, BKK Ambon Tahun 2025

N O	INDIKATOR KINERJA	BKK JAYAPURA		BKK PONTIANAK		BKK KUPANG		BKK AMBON		ANALISIS
		T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Realisasi Anggaran	96	80.61 (83.97)	96	84.53 (88.05)	96	86.40 (90)	96	80.30 (83.65)	Pada Tahun 2025 Satker BKK Kelas I Jayapura, BKK Kelas I Pontianak, BKK Kelas I Ambon dan BKK Kelas I Kupang tidak mencapai realisasi. Tetapi secara capaian BKK Kelas I Kupang memperoleh realisasi tertinggi sebesar 86.40 dengan capaian kinerja 90% dibandingkan dengan ketiga satker pembanding lainnya.

Grafik 14. Distribusi Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Jayapura Tahun 2023 s.d Tahun 2025



Berdasarkan diatas terlihat bahwa realisasi terbesar terdapat di BKK Kupang yaitu sebesar 86.40% dengan capaian indikator sebesar 90% disusul BKK Pontianak, BKK Jayapura dan BKK Ambon.

4) Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Target Nasional

Perbandingan indikator persentase realisasi anggaran dengan target nasional berdasarkan penetapan dari Mentri Kesehatan, target nasional pada indiaktor ini yaitu 96%.

Tabel 41. Distribusi Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	CAPAIAN TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Persentase Realisasi Anggaran	96%	80,61%

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator persentase realisasi anggaran sebesar 80,61% tidak dapat mencapai target nasional. Capaian realisasi anggaran ini menggunakan pagu anggaran atau berdasarkan omspan, bila dibandingkan menggunakan pagu efektif atau SAKTI persentase realisasi anggaran sebesar 98,61%.

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

BKK Kelas I Jayapura telah melakukan berbagai upaya guna mencapai target realisasi anggaran, antara lain dengan cara:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memfokuskan pada menyusun kembali rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada halaman III DIPA secara akurat sesuai rencana kegiatan.
- 2) Memaksimalkan realisasi belanja bersumber dana PNBPN disebabkan karena adanya efisiensi anggaran semua belanja yang bersumber dana PNBPN direalisasikan dalam satu bulan yang sama.
- 3) Segera mendaftarkan kontrak belanja modal kontraktual yang masih tersisa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi tim keuangan secara berkala (mingguan).

f. Analisa Penyebab Kegagalan

Jika berdasarkan aplikasi Om span Realisasi anggaran pada tahun 2025 belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu hanya sebesar 80.61%. dengan persentase capaian sebesar 84%. Tetapi jika dibandingkan dengan pagu efektif (ketersediaan dana) realisasi yang dicapai adalah sebesar 98.61% atau dengan capaian sebesar 103%. Hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap minggu sehingga dapat mengidentifikasi jika ada masalah yang dapat menyebabkan rencana penarikan dana tidak dapat dijalankan.

g. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kendala dalam mencapai realisasi yang maksimal disebabkan karena adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta turunannya Surat dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor PR.04.02/C/263/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Penetapan Distribusi Pagu Penghematan/Efisiensi Belanja pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit TA 2025. Dengan adanya instruksi tersebut maka BKK Kelas I Jayapura sebagai Unit Pelaksana

Teknis di bawah Ditjen Penanggulangan Penyakit melakukan penghematan/efisiensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang semula Rp15.305.500.000,- ,setelah diblokir sebesar Rp2.925.964.000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp12.379.536.000,- Hal ini mengakibatkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat dan bahan khususnya kegiatan yang berasal dari program pencegahan dan pengendalian penyakit yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari BKK Jayapura. Selain itu terdapat penambahan pagu untuk belanja pegawai yang tidak terealisasi sepenuhnya sehingga ketika pagu anggaran bertambah maka realisasi juga akan berkurang.

h. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi antara lain dengan memaksimalkan belanja barang untuk kegiatan yang berasal dari program dukungan manajemen serta tidak menunda pertanggungjawaban keuangan setiap selesai pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tim keuangan secara berkala (mingguan).

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Capaian indikator realisasi anggaran sebesar 80.61% dari target 96% dengan capaian kinerja 83.97% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 517.776.000,- . dari total pagu Rp 518.035.000,- sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 3 (tidak efisien). Perhitungan efisiensi anggaran untuk indikator ini, menggunakan rumus sebagai berikut

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran kinerja
CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{(518.035.000 \times 84) - 517.776.000}{(518.035.000 \times 84)} \times 100 \\
 &= -19 \\
 NE &= 50\% + \frac{-19}{20} \times 50 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran berdasarkan perhitungan capaian kinerja (CKI). Indikator tercapai efisien karena capaian indikator kinerja kegiatan melebihi target dengan anggaran minimal.

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka indikator nilai realisasi anggaran di wilayah kerja BKK Kelas I Jayapura, sumber daya yang berperan adalah semua pegawai yang berada di BKK Kelas I Jayapura mulai dari pejabat administrasi, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, PPPK dan PPNPN baik yang di teknis maupun di administrasi. Sumber daya yang berperan dalam mewujudkan tercapainya indikator ini adalah analis pengelola keuangan APBN, pranata keuangan APBN, perencana dan seluruh tim kerja di BKK Kelas I Jayapura.

Adapun pelatihan-pelatihan terkait pengembangan sumber daya manusia terkait realisasi anggaran antara lain Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencana dan Kompetensi Jabatan Fungsional; E-Learning Pengantar Analisis Laporan Keuangan Dalam Penilaian dan E-learning Pengamanan dan Pemeliharaan BMN.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama Tahun 2025. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 659.353.236,- atau mencapai 329,68% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 200.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara tahun 2025 sebesar Rp.12.526.004.281,- atau mencapai 80,61% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.538.558.000. Selama tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran, total anggaran terblokir sebesar Rp.2.836.164.000,- pagu efektif pada tahun 2025 sebesar Rp.12.702.394.000,-, sehingga persentase realisasi anggaran berdasarkan pagu

efektif sebesar 98,61%. Ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 42. Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja s.d Tahun Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura**

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	200.000.000	659.353.236	329,68
PNBP	200.000.000	659.353.236	329,68
Belanja Negara	15.538.558.000	12.526.004.281	80,61
51 Belanja Pegawai	7.727.448.000	7.567.395.106	97,93
52 Belanja Barang	6.942.995.000	4.438.123.675	63,92
53 Belanja Modal	868.115.000	520.485.500	59,96

Pagu Anggaran DIPA sebesar Rp. 15.538.558.000,- ,setelah diblokir sebesar Rp. 2.836.164.000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp. 12.702.394.000,-, dan telah dilakukan 10 (sepuluh) kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi 1 tanggal 7 Februari 2025 DS:9997-4103-8722-0134 Pengalokasian Gaji Non ASN.
- 2) Revisi 2 tanggal 21 Februari 2025 DS:4290-8310-2745-6721 revisi terkait efisiensi kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, nilai efisiensi sebesar Rp2.925.764.000,-
- 3) Revisi 3 tanggal 19 April 2025 DS:4290-8310-2745-6721 revisi terkait pemutakhiran data POK.
- 4) Revisi 4 tanggal 07 Juli 2025 DS : 4290-8310-2745-6721 dalam rangka pemutakhiran POK dan revisi halaman III DIPA untuk penilaian IKPA Triwulan III Tahun 2025.
- 5) Revisi 5 tanggal 31 Juli 2025 DS : 0001-0554-8040-7162. Revisi dalam hal Pagu tetap untuk memenuhi program prioritas hal Penyelesaian Usulan Revisi Relaksasi Blokir.
- 6) Revisi 6 tanggal 3 Oktober 2025 DS:0001-0554-8040-7162, revisi Pemutakhiran POK dan Penyesuaian Halaman iii DIPA Triwulan IV 2025.
- 7) Revisi 7 tanggal 23 Oktober 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK pada Gaji dan tunjangan dalam rangka pendistribusian anggaran untuk gaji PPPK Tahap I dan PPPK Optimalisasi.

- 8) Revisi 8 tanggal 28 Oktober 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK pada anggaran gaji dan tunjangan dalam rangka penambahan akun 511633 untuk belanja tunjangan umum PPPK.
- 9) Revisi 9 tanggal 28 November 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi pemutakhiran POK dan penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai.
- 10) Revisi 10 tanggal 10 Desember 2025 DS:8488-9380-5505-9331, revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran untuk kegiatan layanan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang serta optimalisasi gaji PPPK paruh waktu.

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA- 024.05.2.416032/2025 tanggal 2 Desember 2024, BKK Kelas I Jayapura mendapatkan 2 (dua) Program Pelaksanaan kegiatan, yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit.

Selama tahun anggaran 2025 terdapat 10 kali revisi DIPA dan RKAKL. Revisi bertujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja. Revisi DIPA dan RKAKL tersebut antara lain pemutakhiran revisi POK untuk mengakomodir gaji Non ASN dan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA Triwulan I. Revisi 2 dalam rangka kebijakan penyesuaian belanja negara dan pemerintah lainnya sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 01 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Revisi 3, pemutakhiran revisi POK dan data RPD Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA Triwulan II. Revisi 4, Tanggal 07 Juli 2025 dalam rangka pemutakhiran POK dan revisi halaman III DIPA untuk penilaian IKPA Triwulan III Tahun 2025, revisi 5, Tanggal 31 Juli 2025 revisi dalam hal pagu tetap untuk memenuhi program prioritas hal penyelesaian usulan revisi relaksasi blokir. Triwulan IV tahun 2025, revisi 6 tanggal 3 Oktober 2025 revisi pemutakhiran POK dan penyesuaian Halaman iii DIPA Triwulan IV 2025. Revisi 7 sampai revisi 10 terkait gaji dan tunjangan dalam rangka pendistribusian anggaran untuk gaji PPPK Tahap I, PPPK Optimalisasi dan PPPK paruh waktu



serta penyesuaian anggaran pagu minus belanja pegawai dan optimalisasi anggaran untuk kegiatan layanan pemeriksaan alat angkut.

Tabel 43. Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI ANGGARAN
1	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2.733.762.000	1.382.301.000	1.372.284.350
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	12.804.796.000	11.320.093.000	11.154.089.981
TOTAL		15.538.558.000	12.702.394.000	12.526.374.331

2. Realisasi Anggaran Menurut Indikator

Realisasi anggaran untuk mencapai 8 (delapan) indikator sebesar Rp.12.526.374.331,- atau 80,61% dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.538.558.000,- bila dibandingkan dengan pagu efektif persentase realisasi anggaran sebesar 98,61% . Distribusi realisasi anggaran menurut indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 44. Realisasi Anggaran (Rp) Menurut Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura Tahun 2025

NO	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	PERSEN (%) PAGU ANGGARAN	PERSEN (%) PAGU EFEKTIF	TOTAL ANGGARAN BLOKIR
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	713.180.000	339.420.000	330.478.000	46,34	97,37	373.760.000
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	833.183.000	345.791.000	345.515.350	41,47	99,92	487.392.000
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	353.451.000	121.060.000	120.965.000	34,22	99,92	232.391.000
4	Nilai kinerja anggaran	12.156.734.000	11.177.689.000	11.011.747.916	90,58	98,52	979.045.000

5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	330.046.000	142.289.000	142.227.065	43,09	99,96	187.757.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	203.959.000	115.000	115.000	0,06	100	203.844.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	351.939.000	57.995.000	57.550.000	16,35	99,23	293.944.000
8	Persentase Realisasi Anggaran	596.066.000	518.035.000	517.776.000	86,87	99,95	78.031.000
TOTAL		15.538.558.000	12.702.394.000	12.526.374.331	80,61	98,61	2.836.164.000

3. Realisasi Anggaran Per Rincian Output Program Prioritas Nasional

Realisasi anggaran per rincian output adalah laporan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang dialokasikan untuk suatu rincian output (kegiatan atau program tertentu) dengan realisasi atau penggunaan anggaran yang sebenarnya. Laporan ini mengukur sejauh mana kegiatan atau program tersebut mencapai target yang telah ditetapkan dan bagaimana anggaran digunakan sesuai rencana. Berdasarkan realisasi volume rincian output pada tahun 2025 telah memenuhi target rincian output

Tabel 45. Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progres Capaian
07	KESEHATAN	15.538.558.000	12.526.374.331	80,61%				
03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.733.762.000	1.372.284.350	50,2%				
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.733.762.000	1.372.284.350	50,2%				
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2.733.762.000	1.372.284.350	50,2%				
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.237.467.000	524.118.350	42,35%				

016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	43.436.000	8.975.350	20,66%	7	Layanan	7	100%
017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	159.902.000	9.400.000	5,88%	33	Layanan	33	100%
U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	118.800.000	59.400.000	50%	135	Layanan	135	100%
U03	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBN	79.200.000	39.600.000	50%	90	Layanan	90	100%
U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	179.200.000	170.360.000	95,07%	112	Layanan	112	100%
U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	19.616.000	14.176.000	72,27%	16	Layanan	16	100%
U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	131.895.000	56.943.000	43,17%	45	Layanan	45	100%
U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	9.640.000	2.410.000	25%	20	Layanan	20	100%
U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	20.430.000	4.086.000	20%	15	Layanan	15	100%
U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	30.240.000	8.820.000	29,17%	84	Layanan	84	100%
U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	103.200.000	25.680.000	24,88%	60	Layanan	60	100%
U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	31.800.000	8.850.000	27,83%	60	Layanan	60	100%
U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	15.768.000	4.590.000	29,11%	12	Layanan	12	100%
U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	32.730.000	12.165.000	37,17%	6	Layanan	6	100%
U18	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Kategori 2	127.400.000	63.700.000	50%	140	Layanan	140	100%
U19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	129.360.000	32.340.000	25%	196	Layanan	196	100%
U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	4.850.000	2.623.000	54,08%	5	Layanan	5	100%
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.258.413.000	790.616.000	62,83%				
001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	1.258.413.000	790.616.000	62,83%	27	Paket	27	100%

TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	237.882.000	57.550.000	24,19%				
001	Pelatihan Kesehatan	237.882.000	57.550.000	24,19%	12	Orang	12	100%
90	KESEHATAN LAINNYA	12.804.796.000	11.154.089.981	87,11%				
WA	Program Dukungan Manajemen	12.804.796.000	11.154.089.981	87,11%				
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	12.804.796.000	11.154.089.981	87,11%				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.119.817.000	11.005.442.779	90,81%				
956	Layanan BMN	40.000.000	0	0%	4	Layanan	4	100%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8.200.000	115.000	1,4%	5	Layanan	5	100%
962	Layanan Umum	41.037.000	340.000	0,83%	8	Layanan	8	100%
963	Layanan Data dan Informasi	4.400.000	4.400.000	100%	2	Layanan	2	100%
994	Layanan Perkantoran	12.026.180.000	11.000.587.779	91,47%	26	Layanan	26	100%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	120.000.000	120.000.000	100%				
951	Layanan Sarana Internal	120.000.000	120.000.000	100%	1	Unit	1	100%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	154.174.000	6.420.137	4,16%				
954	Layanan Manajemen SDM	40.117.000	6.420.137	16%	9	Orang	9	100%
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	114.057.000	0	0%	59	Orang	59	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	410.805.000	22.227.065	5,41%				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	89.027.000	0	0%	2	Dokumen	2	100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	139.505.000	0	0%	4	Dokumen	4	100%
955	Layanan Manajemen Keuangan	121.019.000	22.227.065	18,37%	24	Dokumen	24	100%
961	Layanan Reformasi Kinerja	56.254.000	0	0%	6	Dokumen	6	100%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5.000.000	0	0%	1	Dokumen	1	100%

4. Penjelasan Realisasi Mencapai Target

Selama tahun anggaran 2025, realisasi anggaran untuk mencapai 8 (delapan) indikator sebesar Rp12.526.374.331,- atau 80,61% dengan pagu anggaran sebesar Rp15.538.558.00,- dan pagu efektif sebesar

Rp12.702.394.000,- (98,61%). Langkah - langkah yang dilakukan dalam pencapaian realisasi anggaran antara lain memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan (RPK dan RPD), memaksimalkan belanja barang untuk kegiatan tidak terblokir serta tidak menunda pertanggungjawaban keuangan setiap selesai pelaksanaan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan yang didalamnya melibatkan pimpinan sebagai penentu kebijakan.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pada capaian kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura pada Tahun 2025 melaksanakan tupoksi lain dan memperoleh apresiasi kinerja berupa:

1. Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis terhadap Calon Jamaah Umroh (CJU) dan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) tahun 2025, penerbitan ICV sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) dokumen, penerbitan e-ICV sebanyak 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) dokumen, Vaksinasi Meningitis sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) orang, Vaksinasi Yellow fever 12 (dua belas) orang dan Vaksinasi Influenza sebanyak 0 (nol) orang, Tifoid 1 (satu) orang yang merupakan salah satu bagian yang diperoleh untuk mendukung pencapaian indikator 2 (dua) persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
2. Penerbitan dokumen kesehatan tahun 2025, *Health Book* sebanyak 13 (tiga belas) buku dan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) sebanyak 32 (tiga puluh dua) sertifikat, yang merupakan salah satu bagian yang diperoleh untuk mendukung pencapaian indikator 1 (satu) Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN dan indikator 2 (dua) persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan “Walikota Turun Kampung (Turkam)” Program Turkam membangun dari pinggiran mengusung tema “Membangun Kota Jayapura dari Gerbang Kampung” dengan slogan “Bangun Kampung, Bangun Kota Jayapura” pada tanggal 13-15 Juni 2025. Program ini berfokus pada pendekatan partisipatif untuk menangani isu kemiskinan, pendidikan,



kesehatan, infrastruktur dan tata kelola kampung. BKK Jayapura berpartisipasi dalam program layanan kesehatan yaitu melaksanakan IRS (*Indoor Residual Spraying*) dan Fogging yang dilaksanakan H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan di 8 (delapan) kampung adat wilayah kota Jayapura.

4. Berpartisipasi dalam kegiatan Donor Darah dalam rangka *Soft Launching Opening* Rumah Sakit Vertikal Jayapura pada tanggal 11 Juni 2025, merupakan kegiatan - kegiatan yang pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian pada indikator 1 (satu) indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN.
5. Berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 80 Tahun di PLBN Skouw Tanggal 17 Agustus 2025 dengan mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor darah bagi Masyarakat dan Stakeholder yang ada di PLBN Skouw, kegiatan ini juga mendukung pencapaian pada indikator 1 (satu) indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN.
6. Berpartisipasi dalam peringatan hari perhubungan Nasional Tanggal 08 September 2025 dengan melaksanakan Bakti sosial pemeriksaan cek kesehatan gratis di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura, kegiatan ini juga mendukung pencapaian pada indikator 1 (satu) indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBN.
7. Berpartisipasi dalam Semarak HUT Ke-15 BNPP RI di PLBN Skouw dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Gedung check point kedatangan pada tanggal 16 September 2025, kegiatan ini diikuti oleh semua stakeholder yang bertugas di PLBN Skouw dan mendukung pencapaian pada Indikator 1 (satu) Indeks Deteksi Faktor Risiko Bandara/Pelabuhan/PLBN.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan Table Top Exercise serta Latihan penanggulangan keadaan darurat (Partial Exercise) dan Airport Contingency Exercise dengan waktu pelaksanaan tanggal 08 s/d 09 Oktober 2025 di Aula Angkasa Pura Indonesia dan Lapangan Apron Sisi Timur dalam rangka simulasi di wilayah kerja Bandara Sentani dan mendukung indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
9. Berpartisipasi dalam kegiatan Airport Rescue dan Fire Fighting Challenge dengan skenario terjadi kebakaran pada Gedung di area bandara. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025. Di wilayah kerja Bandara



Sentani dan mendukung indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

10. Berpartisipasi dalam kegiatan Table Top Exercise serta Latihan penanggulangan keadaan darurat (*Partial Exercise*) dan *Airport Contingency Exercise* dengan waktu pelaksanaan tanggal 14 Januari 2025 dan pelaksanaan simulasi singkat tentang simulasi penanganan keadaan darurat penerbangan di wilayah kerja Bandara Wamena. Kegiatan tersebut mendukung indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

**Gambar 6. Dokumentasi Capaian Kinerja Lainnya
BKK Kelas I Jayapura Tahun 2025**

**Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi di Wilayah
Pelabuhan Laut Jayapura (Kantor Induk)**



**Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
di wilayah kerja PLBN Skouw**



Pelaksanaan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat di wilayah kerja Bandara Sentani



Pelaksanaan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat di wilayah kerja Bandara



Pelaksanaan pengendalian Vektor dalam rangka Walikota Turun Kampung di Kota



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian kinerja yang telah diraih menunjukkan adanya peningkatan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan. Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta peningkatan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura tahun 2025 adalah laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang berdasarkan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian hasil kinerja.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2025 BKK Kelas I Jayapura tahun 2025, dari 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan dan terdapat revisi perjanjian kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator persentase realisasi anggaran sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya telah mencapai target, secara keseluruhan capaian kinerja BKK Kelas I Jayapura sebesar 104%. Capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan masing-masing sasaran strategis meliputi :

1. Kegiatan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di bandara/pelabuhan/PLBN, realisasi berjumlah 0,90 dari target 0,88, dengan capaian kinerja 102%. Indikator ini merupakan indikator yang mencapai target. dan terdapat



perubahan target. Meskipun capaian indikator ini mencapai target tetapi ditemukan beberapa kendala antara lain :

- 1) Pada parameter pemeriksaan alat angkut atau dokumen GCDH belum terlaksananya lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di PLBN Skouw sehingga belum ada perlintasan langsung kendaraan dari Indonesia (Jayapura) ke Papua New Guinea (Vanimo). Hal ini mempengaruhi pencapaian parameter pemeriksaan alat angkut karena GCDH belum dapat terealisasi.
 - 2) Pada parameter pemeriksaan alat angkut, belum optimalnya pengawasan alat angkut melalui RBA (*Risk Based Assessment*) di SINKARKES, karena masih terdapat agen pelayaran yang belum mengunggah dokumen Kesehatan kapal dengan lengkap atau tidak sesuai ketentuan pada aplikasi SINKARKES.
- b. Capaian Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada Orang, Alat angkut, Barang dan Lingkungan, realisasi 100%, dari target 99% dengan capaian kinerja 101%. Meskipun capaian indikator ini mencapai target tetapi ditemukan kendala yaitu terdapat kekurangan sumber daya manusia (tenaga medis dan paramedis) khususnya di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura (Kantor induk) yang menyebabkan kendala dalam kelancaran kegiatan tugas pokok dan fungsi.
- c. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara, realisasi 1 dari target 0,91 dengan capaian kinerja 110%. Meskipun capaian indikator ini mencapai target tetapi ditemukan kendala pada persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 terkait perilaku masyarakat di wilayah buffer yang masih sering menampung air bersih menggunakan drum di luar maupun didalam rumah lebih dari 1 minggu sehingga menjadi tempat perkembangbiakan jentik *Aedes sp.*, lantas edukasi yang telah dilakukan masih sulit untuk diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.
2. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan capaian indikator kegiatan sebagai berikut :
- d. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran, realisasi 98,23 dari target 90 dengan capaian kinerja 102%.

- e. Capaian indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, realisasi 97,08 dari target 93 dengan capaian kinerja 104%.
- f. Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK satker realisasi 87,08 dari target 75 dengan capaian kinerja 116%.
- g. Capaian Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan realisasi 98% dari target 95% dengan capaian kinerja 102%.
- h. Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran dengan realisasi 80,61% dari target 96% dengan capaian kinerja 84%. Indikator ini merupakan indikator yang tidak mencapai target, karena terdapat efisiensi anggaran tetapi bila menggunakan pagu efektif persentase realisasi anggaran sebesar 98,61%. Terdapat kendala dalam mencapai target ini karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden. Hal tersebut juga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat dan bahan khususnya kegiatan yang berasal dari program pencegahan dan pengendalian penyakit yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari BKK Jayapura.

B. TINDAK LANJUT

Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Jayapura pada Tahun 2025 masih disusun dengan mengacu pada dokumen Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2022–2024, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. RKT tersebut kemudian dijabarkan dan diselaraskan dalam perencanaan dan penganggaran melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2025, sehingga seluruh sasaran, indikator kinerja, serta alokasi anggaran yang ditetapkan tetap mengacu pada arah kebijakan dan tujuan strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pencapaian target kinerja ditemukan beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas CIQS di wilayah kerja PLBN Skouw termasuk CIQS yang ada di wilayah Papua New Guinea dengan aktif mengikuti rapat koordinasi dan pertemuan di PLBN Skouw serta mendorong percepatan pelaksanaan lalu lintas Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) dalam berbagai

forum pertemuan seperti forum bilateral *Border Liaison Meeting* (BLM).

2. Meningkatkan sosialisasi bagi stakeholder (agen pelayaran/ Nakhoda) tentang penginputan Risk Based Assessment (RBA) dan pengisian Maritim Declaration Health (MDH) pada aplikasi sinkarkes.
3. Melakukan pemerataan sumber daya manusia (SDM) medis dan paramedis antara unit induk dan wilayah kerja berdasarkan analisis beban kerja, serta menyusun usulan formasi pegawai melalui pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) maupun mekanisme *job vacancy* sesuai kebutuhan organisasi.
4. Melakukan edukasi setiap kali pelaksanaan survei jentik *Aedes sp.*, dan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 3M Plus.
5. Melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan RPK dan RPD yang telah dibuat oleh perencana. Selain itu agar capaian output dapat mencapai target diharapkan secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progress/PCRO) dan capaian (realisasi volume RO); melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period regular. Memaksimalkan belanja barang untuk kegiatan yang berasal dari program dukungan manajemen serta tidak menunda pertanggungjawaban keuangan setiap selesai pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan setiap minggu.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDIKATOR 1 (INDEKS DETEKSI FAKTOR RISIKO DI BANDARA/PELABUHAN/PLBN)
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

INDIKATOR	PARAMETER	TARGET TOTAL	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUNI			JULI			AUGUST			SEPT			OKT			NOV			DES		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Pemeriksaan Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) (Bandara, Pelabuhan, PLBN)		2.386.843	209.826	257.001	122	396.499	444.484	112	597.977	640.463	107	799.791	832.789	104	982.481	1.016.707	103	1.183.826	1.210.963	102	1.389.282	1.435.534	103	1.588.209	1.632.409	103	1.780.640	1.822.255	102	1.974.975	2.020.444	102	2.173.269	2.218.852	102	2.386.843	2.489.180	104
	Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN (Bandara)	1.932.266	163.079	194.417		318.080	341.575		480.980	495.238		643.858	648.720		792.758	799.052		956.548	944.363		1.121.524	1.123.141		1.282.798	1.283.360		1.442.641	1.437.334		1.602.945	1.596.639		1.765.845	1.755.682		1.932.266	1.964.745	
	Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN (Pelabuhan)	263.995	28.000	27.696		45.096	48.559		67.107	70.427		90.910	91.187		109.320	105.220		131.430	135.896		156.300	161.139		178.538	176.955		196.673	192.488		215.583	209.294		235.409	225.519		263.995	261.172	
	Pemeriksaan crew pesawat (termasuk ICV personil kedatangan)	142.237	14.270	29.368		24.870	45.108		37.370	61.566		48.650	76.170		60.396	92.025		72.020	106.085		83.819	123.160		95.639	140.866		106.299	156.438		117.571	174.199		128.851	193.088		142.237	213.674	
	Pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV awak kapal)	45.265	4.306	5.302		8.096	8.786		11.852	12.663		15.384	15.853		18.822	19.153		22.312	23.008		25.802	26.029		29.211	28.932		32.649	33.337		36.327	37.351		40.279	41.295		45.265	46.176	
	Data kunjungan poliklinik (bukan penumpang (Pelabuhan dan Bandara)	1.700	141	174		282	367		423	472		564	595		705	773		846	918		987	1.148		1128	1.317		1273	1.497		1414	1.636		1555	1.776		1700	1.872	
	Laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja (Pelabuhan, Bandara PLBDN)	180	10	12		35	32		35	32		45	42		70	78		90	101		100	113		125	143		135	153		135	153		160	171		180	183	
	HIV disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	300	0	0		0	0		50	0		100	50		100	100		150	150		200	200		200	200		250	250		250	250		300	300		300	300	
	TB disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	300	0	0		0	0		50	0		100	50		100	100		150	150		200	200		200	200		250	250		250	250		300	300		300	300	
	Malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang dan awak)	600	20	32		40	57		110	65		180	122		210	206		280	292		350	404		370	436		470	508		500	672		570	721		600	758	
Pemeriksaan Alat Angkut (pesawat dan kapal)		880	62	62	100	127	120	94	191	192	101	258	250	97	322	312	97	383	383	100	440	440	100	500	501	100	567	569	100	640	641	100	707	713	101	781	797	102
	Gendec terverifikasi (ttd/stempel)	18	0	3		2	5		4	5		7	8		9	12		10	13		11	14		13	14		15	16		15	17		16	18		18	23	
	COP	12	1	1		2	3		4	5		7	8		9	8		10	12		11	13		14	18		19	23		22	23		25	28		28	28	
	PHQC (keberangkatan)	820	61	58		123	112		183	182		244	234		304	292		363	358		418	413		473	469		533	530		603	601		666	667		734	746	
	GCDH (PLBDN)	30	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	0	
Pemeriksaan Barang (jenazah)		682	56	70	125	112	132	118	170	204	120	228	261	114	284	318	112	340	389	114	398	445	112	455	494	109	511	549	107	568	608	107	625	657	105	682	695	102
	Ijin angkut jenazah	682	56	70		112	132		170	204		228	261		284	318		340	389		398	445		455	494		511	549		568	608		625	657		682	695	
Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor) (Bandara, Pelabuhan, PLBN)		1.334	168	172	102	341	347	102	511	518	101	682	695	102	855	870	102	1031	1051	102	1207	1229	102	1380	1408	102	1558	1590	102	1740	1774	102	1921	1955	102	2094	2124	101
	Form inspeksi kesling TTU	312	26	27		52	54		78	81		104	110		130	137		156	164		182	191		208	218		236	245		266	272		296	299		326	326	
	Form inspeksi kesling TPP	660	59	57		119	117		178	175		237	234		297	294		357	357		419	419		479	479		541	541		605	605		668	668		727	727	
	Form inspeksi kesling ISPAB	1	53	53		109	109		163	163		218	218		274	274		333	333		390	390		446	446		503	503		560	560		617	617		671	671	
	Form inspeksi kesling air (lokus)	1	0	0		1	1		2	2		3	3		4	4		5	5		6	6		7	7		8	8		9	9		10	10		10	10	
	Rekapitulasi hasil survei vektor (bandara/pelabuhan)	360	30	35		60	66		90	97		120	130		150	161		180	192		210	223		240	258		270	293		300	328		330	361		360	390	
NILAI INDEKS			0,92			0,91			0,90			0,91			0,88			0,88			0,88			0,86			0,86			0,87			0,86			0,90		

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	104	104,0	520,00	100	120	600		
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	102	102,0	510,00	100	120	600		
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	102	102,0	306,00	100	120	360		
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	101	120,0	600,00	100	120	600		
TOTAL					1.936,00			2.160,00		0

Nilai Indeks

0,90

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

Jayapura, 09 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDIKATOR 2 (PERSENTASE FAKTOR RISIKO PENYAKIT DIPINTU MASUK YANG DIKENDALIKAN PADA ORANG, ALAT ANGKUT, BARANG DAN LINGKUNGAN)

BULAN DESEMBER TAHUN 2025

CAPAIAN FAKTOR RISIKO YANG DITEMUKAN																
PEMERIKSAAN	FAKTOR RISIKO DITEMUKAN	PARAMETER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL	
Orang	Suhu tinggi > 37,5, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8,5, haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp, HIV/TB/malaria positif	Suhu tinggi > 37,5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	
		Covid positif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sakit	149	120	134	141	151	149	160	168	171	162	132	160	1797	
		Saturasi <95,	5	7	8	5	1	0	5	2	2	3	4	3	45	
		Hamil >32 minggu,	5	2	4	1	5	0	5	2	2	1	2	1	30	
		Hamil <12 minggu	3	2	2	2	3	0	3	4	5	4	3	3	34	
		Hb <8,5,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyakit menular yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Belum vaksin meningitis (Haji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ICV palsu/exp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HIV/TB/malaria positif	9	11	1	1	11	3	7	11	5	20	8	6	93	
		Karantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alat Angkut	Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk, ada penumpang positif,	Ditemukan vektor kecoa	1	0	1	1	0	2	1	1	3	0	0	0	10	
		Ditemukan vektor tikus	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Ditemukan vektor lalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ditemukan vektor nyamuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Terdapat penumpang positif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barang	Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB)	Jenazah dengan Penyakit menular dan potensial wabah	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5	
Lingkungan	TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan), TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak), Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			174	142	150	151	172	154	182	190	191	191	149	173	2019	

CAPAIAN FAKTOR RISIKO YANG DIKENDALIKAN															
PEMERIKSAAN'	FAKTOR RISIKO DIKENDALIKAN	PARAMETER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Orang	Rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi (tidak termasuk COVID), pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)	Rujukan	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	6
		Isolasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tolak berangkat	17	10	14	18	14	15	19	12	5	12	12	9	157
		Vaksinasi (tidak termasuk COVID)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pertolongan gawat darurat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
		Ijin angkut orang sakit	141	117	130	127	141	133	147	160	169	155	123	154	1697
		Surat layak terbang bagi yang beresiko	6	4	4	3	5	0	7	5	6	4	5	4	53
		Pengobatan malaria	9	11	1	1	7	3	6	11	4	20	8	6	87
Rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alat Angkut	SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, one month extention	SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi)	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4
		Surat bebas karantina kapal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Laporan desinseksi pesawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		One month extention	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	6
Barang	Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap	Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4
Lingkungan	TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor	TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) => yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			174	142	151	150	172	154	181	188	191	191	149	173	2016
PERSENTASE CAPAIAN			100	100	101	99	100	100	99	99	100	100	100	100	100

Jayapura, 09 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M.
NIP. 196905312006041001

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDIKATOR 3 (INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA)
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AUGST		SEPT		OKT		NOV		DES	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	40	100	60	40	60	60	60	80	60	60	80	60	80	100	80	100	80	100	100	80	100	80	100	100
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	40	100	60	100	60	100	60	100	60	100	80	100	80	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	40	80	40	80	40	80	60	80	60	80	80	80	80	80	80	80	80	100	80	100	80	100	80	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	40	80	40	80	40	100	60	80	60	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	80	100	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	40	60	40	80	40	60	40	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	80	80	100	100	80	100	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	20	20	20	40	20	60	20	60	40	60	40	40	40	40	40	40	60	60	60	40	60	60	60	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	0	0	0	0	8	0	19	104	27	104	38	104	50	104	62	104	69	104	77	104	88	104	100	104
9	Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	0	0	11	0	20	0	29	104	38	104	47	113	56	113	65	115	75	115	82	115	93	115	100	115
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100
TOTAL																									
NILAI INDEKS		0,40		0,39		0,42		0,68		0,66		0,65		0,80		0,80		0,79		0,80		0,94		0,98	

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500,00	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	80	80	320,00	100	100	400			-
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300			-
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400,00	100	100	400			-
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400,00	100	100	400			-
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500,00	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500,00	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	104	104	415,38	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	115	115	572,73	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali	5	100	100	500,00	100	100	500			
			100		4.408,11			4.400			0

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)
(((6/(9+11))-0
Nilai Indeks 1,00

Jayapura, 09 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura


dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

1. Nilai SMART DJA pada bulan April adalah **98,23** (NKA = Perencanaan Anggaran + Pelaksanaan Anggaran = 99,37 + 97,08).
2. Nilai perencanaan anggaran 99,37, nilai ini meningkat 13,13 dari bulan November.
3. Nilai pelaksanaan anggaran 97,08, nilai ini menurun 0,3 dari bulan Oktober.
4. CRO (Capaian Realisasi Output) 100, penggunaan SBK 100, efisiensi SBK 95,8.

BALAI KEKARANTINAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

Dashio

Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

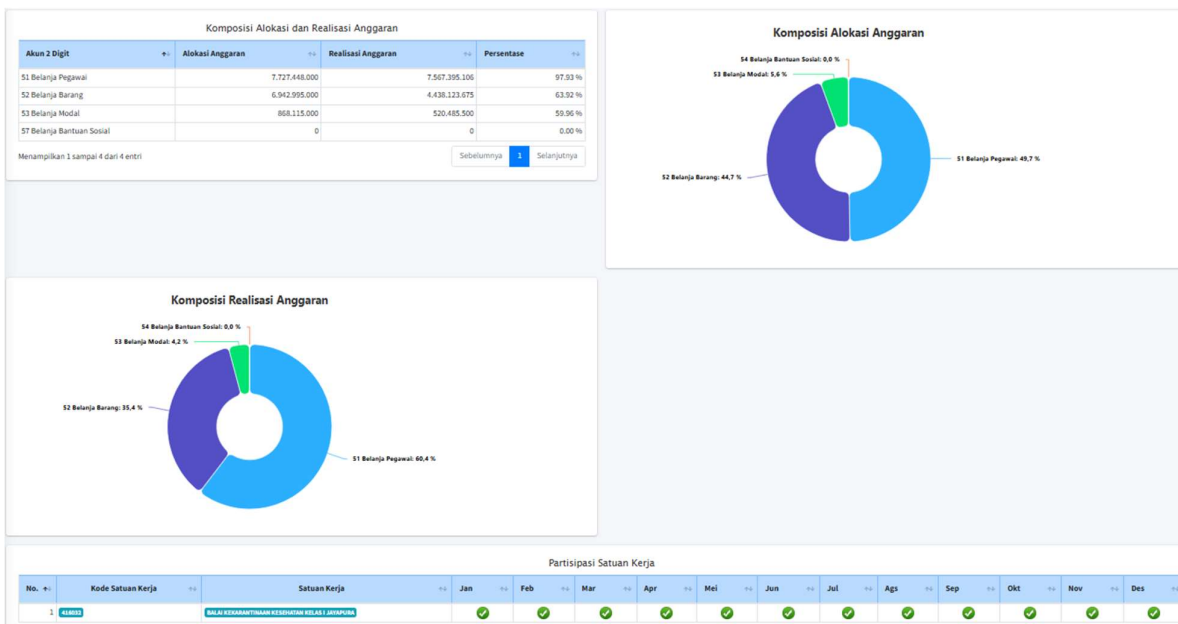
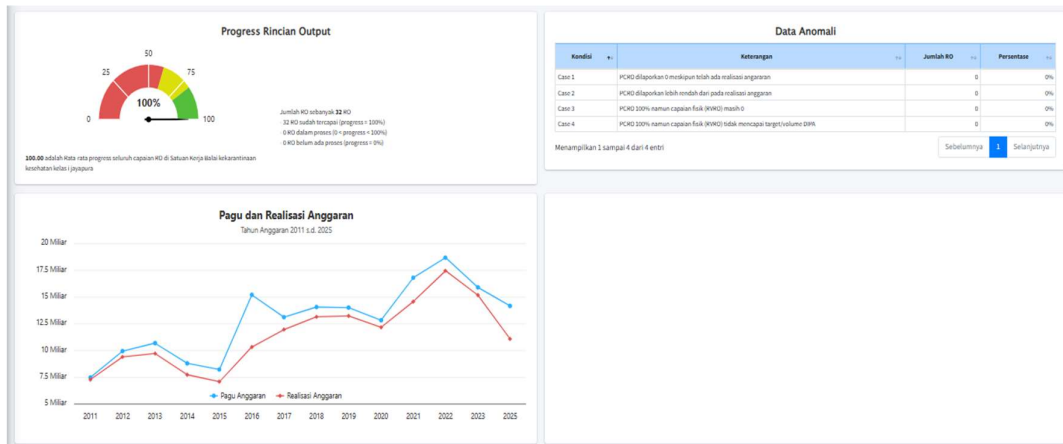
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Kategori	Nilai
CRO (75%)	100
Penggunaan SBK (10%)	100
Efisiensi SBK (15%)	95.8

Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kategori	Nilai
Revisi DRA	10
Deviasi Hal 3 DRA	13.73
Penyerapan Anggaran	19.81
Pengelolaan UP dan TUP	10
Dispensasi SPM	8.93
Selanjut Konstruktif	0
Capaian Output	25
Penyelesaian Tagihan	10



Jayapura, 04 Januari 2026

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Jayapura

dr. Bambang Budiman, M.M
 NIP. 196905312006041001



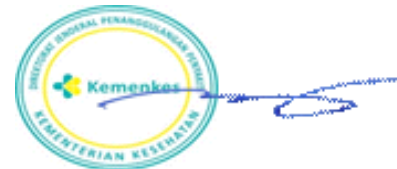
**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	063	024	416032 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA	Nilai	100,00	91,51	99,04	100,00	100,00	85,50	100,00	97,08	100%	0.00	97.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,73	19,81	10,00	10,00	8,55	25,00				
					Nilai Aspek	95.76		96.14				100.00				

INDIKATOR NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA (IKPA)		
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA		
TAHUN	NILAI IKPA	
	TARGET	CAPAIAN
2021	93	84,55
2022	93	74,66
2023	93	93,95
2024	95	92,91
2025	93	97,08

Jayapura, 15 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025

23 Desember 2025

Hal : Penyampaian Hasil Desk Reviu Implementasi WBK Satker
UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pertemuan Desk Reviu Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen P2 Nomor PS.08.02/C.I/6305/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 dan Surat Tugas Plt Direktur Jenderal P2 Nomor PS.08.02/C/4638/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Surat Tugas an Indra Jaya, SKM, M.Epid dkk untuk melakukan Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 27 s.d. 31 Oktober yang dilaksanakan di Gedung Record Center Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat, bersama ini kami sampaikan laporan beserta hasil penilaian Desk Reviu Implementasi Satker WBK Satker UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit,**dr. Andi Saguni, MA**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Lampiran 1

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala BBKK Denpasar
2. Kepala BBKK Makassar
3. Kepala BBKK Medan
4. Kepala BBKK Soekarno Hatta
5. Kepala BBKK Surabaya
6. Kepala BKK Kelas I Ambon
7. Kepala BKK Kelas I Balikpapan
8. Kepala BKK Kelas I Banda Aceh
9. Kepala BKK Kelas I Banjarmasin
10. Kepala BKK Kelas I Banten
11. Kepala BKK Kelas I Dumai
12. Kepala BKK Kelas I Jayapura
13. Kepala BKK Kelas I Kendari
14. Kepala BKK Kelas I Manado
15. Kepala BKK Kelas I Padang
16. Kepala BKK Kelas I Palembang
17. Kepala BKK Kelas I Probolinggo
18. Kepala BKK Kelas I Samarinda
19. Kepala BKK Kelas I Semarang
20. Kepala BKK Kelas I Tanjung Pinang
21. Kepala BKK Kelas I Tarakan
22. Kepala BKK Kelas I Ternate
23. Kepala BKK Kelas II Bitung
24. Kepala BKK Kelas II Jambi
25. Kepala BKK Kelas II Kupang
26. Kepala BKK Kelas II Lhokseumawe
27. Kepala BKK Kelas II Manokwari
28. Kepala BKK Kelas II Merauke
29. Kepala BKK Kelas II Palangkaraya
30. Kepala BKK Kelas II Pangkalpinang
31. Kepala BKK Kelas II Sabang
32. Kepala BKK Kelas II Sampit
33. Kepala BKK Kelas II Sorong
34. Kepala LKK Entikong
35. Kepala LKK Labuan Bajo

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit,



dr. Andi Saguni, MA

Lampiran 2

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

Rekapitulasi Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker Bidang Kekarantinaan Kesehatan

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT															KOMPONEN HASIL				TOTAL PENGUNGKIT + HASIL
		Manajemen Perubahan		Penataan Tatalaksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima	TOTAL HASIL	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP		
1	BBKK Denpasar	3.36	3.80	3.17	3.50	4.34	5.00	5.00	5.00	6.30	7.50	5.00	5.00	27.18	29.80	56.98	17.01	5.00	16.70	38.72	95.69
2	BBKK Makassar	3.77	3.58	2.29	3.00	4.59	4.25	5.00	5.00	5.73	6.88	5.00	5.00	26.38	27.71	54.09	16.32	3.75	14.83	34.90	88.99
3	BBKK Medan	4.00	4.00	3.14	3.50	4.49	3.26	4.74	4.75	5.49	7.50	4.29	4.16	26.15	27.18	53.33	16.67	5.00	16.14	37.81	91.14
4	BBKK Soekarno Hatta	3.52	3.67	3.25	3.50	4.32	2.25	5.00	5.00	7.15	7.50	4.54	4.59	27.78	26.51	54.29	16.36	5.00	14.04	35.41	89.70
5	BBKK Surabaya	3.52	2.56	2.60	3.25	3.09	4.25	5.00	4.51	5.97	7.50	4.78	5.00	24.95	27.07	52.02	16.32	3.75	15.88	35.95	87.97
6	BKK Kelas I Ambon	2.58	3.33	2.44	3.50	4.54	2.25	4.58	4.75	4.56	7.50	4.50	4.28	23.21	25.61	48.81	16.63	5.00	16.01	37.64	86.45
7	BKK Kelas I Balikpapan	3.81	2.95	2.02	2.75	4.42	4.25	5.00	4.26	6.14	6.88	4.78	4.81	26.17	25.90	52.07	16.01	2.50	15.88	34.39	86.46
8	BKK Kelas I Banda Aceh	3.78	4.00	3.50	3.50	4.52	4.25	5.00	4.75	6.50	7.50	4.83	5.00	28.13	29.00	57.13	16.45	5.00	16.77	38.22	95.35
9	BKK Kelas I Banjarmasin	3.39	3.25	2.85	3.25	4.71	2.25	5.00	5.00	4.77	3.88	3.42	3.76	24.14	21.39	45.53	17.50	5.00	16.01	38.51	84.04
10	BKK Kelas I Banten	3.60	4.00	3.50	3.50	4.88	5.00	5.00	4.00	6.97	6.88	4.96	5.00	28.90	28.37	57.27	16.58	3.75	16.36	36.69	93.97
11	BKK Kelas I Dumai	4.00	4.00	3.50	3.00	4.88	1.50	5.00	5.00	7.25	7.50	4.08	3.76	28.70	24.76	53.47	16.76	5.00	14.66	36.41	89.88
12	BKK Kelas I Jayapura	3.83	3.42	2.18	2.50	4.63	2.25	4.84	4.75	6.69	7.50	2.67	3.35	24.84	23.77	48.61	17.15	5.00	16.32	38.47	87.08
13	BKK Kelas I Kendari	2.31	2.00	2.81	3.17	3.84	2.75	3.74	3.75	4.37	7.50	3.71	3.54	20.77	22.70	43.47	16.80	5.00	14.74	36.54	80.01

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT															KOMPONEN HASIL				TOTAL PENGUNGKIT + HASIL
		Manajemen Perubahan		Penataan Tatalaksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima	TOTAL HASIL	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP		
14	BKK Kelas I Manado	3.24	3.67	2.85	3.00	4.75	4.25	4.01	4.50	7.50	7.50	4.88	5.00	27.23	27.92	55.15	16.81	5.00	16.65	38.46	93.60
15	BKK Kelas I Padang	3.77	4.00	2.89	3.50	4.34	3.00	5.00	5.00	5.72	6.25	4.83	5.00	26.55	26.75	53.30	16.66	5.00	13.35	35.01	88.31
16	BKK Kelas I Palembang	3.89	3.64	3.31	3.50	4.75	5.00	4.84	4.50	7.50	7.50	4.96	5.00	29.25	29.14	58.39	16.72	2.50	16.58	35.80	94.19
17	BKK Kelas I Probolinggo	2.89	3.00	3.04	3.00	4.63	3.00	4.43	4.00	5.80	6.88	5.00	5.00	25.79	24.87	50.67	17.50	5.00	17.50	40.00	90.67
18	BKK Kelas I Samarinda	2.99	2.84	3.22	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	7.50	4.83	5.00	28.55	27.34	55.88	17.17	5.00	16.85	39.02	94.90
19	BKK Kelas I Semarang	3.30	4.00	3.42	3.00	4.75	4.25	5.00	5.00	6.78	6.88	4.92	5.00	28.17	28.13	56.29	16.14	2.50	15.66	34.31	90.60
20	BKK Kelas I Tanjung Pinang	3.83	4.00	2.90	1.50	4.52	4.25	5.00	5.00	7.13	6.88	4.23	2.80	27.62	24.43	52.04	17.50	5.00	17.50	40.00	92.04
21	BKK Kelas I Tarakan	3.19	3.67	3.33	3.00	4.63	5.00	5.00	5.00	6.56	6.25	4.71	5.00	27.42	27.92	55.34	17.50	2.50	16.45	36.45	91.79
22	BKK Kelas I Ternate	2.17	1.33	2.42	3.50	4.63	5.00	3.85	3.50	3.86	4.50	4.96	5.00	21.88	22.83	44.71	14.04	5.00	15.88	34.93	79.64
23	BKK Kelas II Bitung	2.83	4.00	1.47	3.17	4.09	1.75	0.63	1.50	3.98	7.50	2.03	2.49	15.03	20.40	35.44	17.50	5.00	17.50	40.00	75.44
24	BKK Kelas II Jambi	3.72	3.80	2.18	3.00	4.45	2.75	4.57	5.00	4.93	7.50	3.32	4.16	23.18	26.21	49.39	16.72	3.75	16.72	37.19	86.59
25	BKK Kelas II Kupang	2.19	2.94	2.22	3.00	4.25	4.25	4.84	3.77	6.19	6.25	4.42	5.00	24.11	25.21	49.32	16.06	5.00	13.96	35.01	84.33
26	BKK Kelas II Lhokseumawe	1.86	1.28	1.44	2.50	4.19	4.25	4.01	3.50	3.93	6.88	5.00	5.00	20.43	23.40	43.83	17.50	5.00	17.50	40.00	83.83
27	BKK Kelas II Manokwari	3.58	2.00	3.31	3.50	4.75	5.00	5.00	4.51	6.69	7.50	4.57	4.59	27.90	27.09	54.99	16.80	5.00	16.54	38.34	93.33
28	BKK Kelas II Merauke	4.00	4.00	3.50	3.50	4.63	5.00	5.00	5.00	7.50	7.17	5.00	5.00	29.63	29.67	59.29	16.23	5.00	16.54	37.77	97.06
29	BKK Kelas II Palangkaraya	4.00	4.00	2.83	3.00	4.75	3.00	5.00	4.25	7.50	7.50	4.63	4.16	28.71	25.91	54.62	17.46	5.00	15.49	37.94	92.57

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT															KOMPONEN HASIL				TOTAL PENGUNGKIT + HASIL
		Manajemen Perubahan		Penataan Tatalaksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima	TOTAL HASIL	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP		
30	BKK Kelas II Pangkalpinang	3.77	4.00	3.50	3.50	4.59	4.25	5.00	5.00	6.25	7.50	5.00	5.00	28.10	29.25	57.35	16.49	5.00	16.55	38.04	95.39
31	BKK Kelas II Sabang	3.41	2.15	2.31	3.25	4.45	4.25	4.84	3.75	5.83	6.88	4.81	5.00	25.64	25.27	50.91	15.18	2.50	15.58	33.26	84.17
32	BKK Kelas II Sampit	3.08	4.00	3.38	3.50	4.88	5.00	5.00	5.00	6.69	5.63	4.96	5.00	27.97	28.13	56.10	16.22	5.00	16.06	37.28	93.38
33	BKK Kelas II Sorong	3.78	3.08	2.64	3.25	3.75	3.50	5.00	3.75	5.89	7.50	4.32	4.13	25.38	25.21	50.60	17.02	3.75	14.88	35.64	86.24
34	LKK Entikong	1.92	0.33	1.03	2.00	4.34	4.25	5.00	3.71	2.10	6.25	2.78	2.50	17.18	19.04	36.21	15.93	2.50	17.50	35.93	72.14
35	LKK Labuan Bajo	3.72	3.17	2.50	2.25	4.54	5.00	4.84	5.00	5.12	3.88	4.96	5.00	25.69	24.30	49.99	15.75	5.00	15.93	36.68	86.66

Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit,



dr. Andi Saguni, MA

Keterangan :

- P = Aspek Pemenuhan
- R = Aspek Reform
- IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei Eksternal)
- IPKP = Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

KERTAS KERJA INDIKATOR 7 (PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS ASN)

**LIST PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA
BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2025**

[illegible]

[illegible]

PPPK																												
47	Sherly Paliling, AMK					35				16						2											53	Terpenuhi
48	Lili Sampelawang, SE					3				4	3					3,9											39	Terpenuhi
49	Sepviyanto Masiku, SKM									30,6						3											46	Terpenuhi
50	Eko Dwi Sulisty, Amd.Kep					35				1							12										48	Terpenuhi
51	Yakobis de Fretes, Amd.KL					35				3							2										40	Terpenuhi
52	Khoirul Huda Prasetyo, Amd.AK									55																	55	Terpenuhi
53	Gerald Hendra Barung					31																					31	Terpenuhi
54	Resky Alfredo Andrianus					12				5							10										27	Terpenuhi
55	Tri Maya Sari																22										22	Terpenuhi
56	Rintan																38										38	Terpenuhi
57	Rihan Faziran																26										26	Terpenuhi
58	Mardiana Sapitri																47										47	Terpenuhi
59	M. Zacky Nauval																22										22	Terpenuhi
60	Dhio Hassya Firmanda																22										22	Terpenuhi
61	Bayu Pratama																22										22	Terpenuhi
62	Ferly Tahapahing																										0	Tidak Terpenuhi
PPPK PARUH WAKTU																												
63	Togar Parulian Manalu					35																					35	Terpenuhi
64	Meitri N. D Gultom						88			9,5							36										134	Terpenuhi
65	Hariyanto Jafar									3							35										38	Terpenuhi
66	Shinta Novianti																28										28	Terpenuhi

Jayapura, 15 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	416032 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA	PAGU	7,727,448,000	6,942,995,000	868,115,000	0	0	0	0	0	0	15,538,558,000
		REALISASI	7,567,395,106 (97.93%)	4,438,123,675 (63.92%)	520,485,500 (59.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,526,004,281 (80.61%)
		SISA	160,052,894	2,504,871,325	347,629,500	0	0	0	0	0	0	3,012,553,719
GRAND TOTAL		PAGU	7,727,448,000	6,942,995,000	868,115,000	0	0	0	0	0	0	15,538,558,000
		REALISASI	7,567,395,106 (97.93%)	4,438,123,675 (63.92%)	520,485,500 (59.96%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	12,526,004,281 (80.61%)
		SISA	160,052,894	2,504,871,325	347,629,500	0	0	0	0	0	0	3,012,553,719

INDIKATOR PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA		
TAHUN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	
	TARGET	CAPAIAN
2022	-	93,46%
2023	95%	95,45%
2024	96%	98,24%
2025	96%	80,61%

Jayapura, 15 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman

Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 15.305.300.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP. 197603192006041001

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama,

dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Sasaran Strategis		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,96 Indeks
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,91 Indeks
B	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
	manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	90 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Nilai
		Kinerja implementasi WBK satker	75 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95 Persen
		Persentase realisasi anggaran	96 Persen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.733.762.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 12.571.538.000
TOTAL		Rp. 15.305.300.000

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP. 197603192006041001

Pihak Pertama

dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman, M.M

Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA

Jabatan : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 15.538.558.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA
NIP. 196605081992032003

dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Sasaran Strategis		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBN	0,88 Indeks
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,91 Indeks
B	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai

NO	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
	manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	90 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Nilai
		Kinerja implementasi WBK satker	75 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95 Persen
		Persentase realisasi anggaran	96 Persen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.733.762.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 12.804.796.000
TOTAL		Rp. 15.538.558.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA
NIP. 196605081992032003



dr. Bambang Budiman, M.M
NIP. 196905312006041001

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
JAYAPURA**

NOMOR : HK.02.03/ C.X.19/ 821 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyusunan hasil kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura secara rutin dan terpadu, diperlukan data-data & informasi dari setiap pengelola kegiatan serta tim pelaksana penyusunan kegiatan.
- b. Untuk penyusunan hasil kegiatan tugas pokok dan fungsi, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan LAKIP Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura.
- c. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura
- d. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura tentang penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2025 dianggap cakap/mampu melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan LAKIP tahun 2025 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura.
- Pertama : Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan LAKIP Balai Kekarantinaan Kekarantinaan Kelas I Jayapura tahun 2025
- Kedua : Tugas tim berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kekarantinaan Kelas I Jayapura tahun 2025
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala BKK Kelas I Jayapura,

dr. Bambang Budiman

NIP 196905312006041001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
JAYAPURA TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN
2025

Nomor : HK.02.03/C.X.19/821 /2025

Tanggal : 25 April 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA TAHUN 2025**

Ketua : Yuniarti, SE

Sekretaris : Anjar P. Wulandari,SKM

Anggota :

1. Edison Wilson Koibur,SKM
2. Lahadi, SKM
3. Wa Ode Hasna Malik,AMAK
4. Rhika Marliza Rappun,SKM
5. Erwin Livenston S. Awom,SKM
6. Adhytio Pattiasina, SKM
7. Enos Erastra, SKM
8. Maylana Arzianti,SKM
9. Agus Irianto,Amd.Kep
10. Khoirul Huda Prasetyo, AMK

Kepala BKK Kelas I Jayapura,



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001